

**Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si**

**PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK**  
**pada**  
**UPACARA PIODALAN DI PURA BESAKIH**  
**(Perspektif Sosio-Ekologi)**

**Editor**  
**I Gusti Ketut Widana**



**UNHI PRESS**  
**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**  
**DENPASAR 2019**

**PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK  
PADA  
UPACARA PIODALAN DI PURA BESAKIH  
(Perspektif Sosio-Ekologi)**

DISUSUN OLEH

**Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si**

EDITOR

**I Gusti Ketut Widana**



**UNHI PRESS**  
*Publishing*

**PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK  
PADA  
UPACARA PIODALAN DI PURA BESAKIH  
(Perspektif Sosio-Ekologi)**

Penulis : Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si

ISBN : 978-623-91211-4-3

Editor : I Gusti Ketut Widana

Penyunting : Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, SH.H.,M.Fil.H

Desain Sampul dan Tata Letak : I Made Hartaka, M.Fil.H

Penerbit : UNHI Press

Redaksi :  
Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar -Bali  
Telp. (0361) 464700/464800 Email :  
unhipress@unhi.ac.id

Distributor Tunggal :  
UNHI Press  
Jl. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar-Bali  
Telp. (0361) 464700/464800  
Email : unhipress@unhi.ac.id

Cetakan pertama, September 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun  
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Om Swastyastu,*

Puja dan puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*), penulis panjatkan karena atas *Asung Kerta Waranugraha*-Nya-lah buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku ini merupakan hasil penelitian lapangan yang khusus mengkaji tentang pola penanggulangan sampah plastik pada upacara piodalan di Pura Besakih. Studi ini secara umum bertujuan untuk memahami berbagai alasan masyarakat Bali dengan mudahnya dapat mengadopsi barang-barang yang terbuat dari plastik padahal limbah plastik sangat sulit terurai oleh alam (bersifat *undergradable*), sehingga hal ini dapat berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Hal ini menarik sebab ketika apresiasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan diharapkan meningkat, justru yang terjadi malah sebaliknya, yakni kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan semakin menurun ditambah sikap pragmatisme masyarakat semakin tinggi, maka degradasi kualitas lingkungan tidak dapat dihindari.

Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap secara gamlang mengenai pola penanggulangan sampah dan hambatan yang dialami masyarakat dalam menanggulangi sampah pada setiap upacara Piodalan di Pura Besakih, Karangasem, Bali. Buku ini penulis beri judul ‘‘Penanggulangan Sampah Plastik pada Upacara Piodalan di Pura Besakih’’ (Perspektif Sosio-Ekologi) dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwa barang-barang yang terbuat dari plastik sangat mudah disampahkan, dan sampah yang berasal dari limbah plastik bersifat *undergradable* (sulit terurai oleh alam); *Kedua*, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah plastik jika tidak dikelola secara baik sangat berpotensi menimbulkan masalah lingkungan; *Ketiga*, untuk menarik minat pembaca memahami lebih dalam tentang pola penanggulangan sampah di Pura Besakih dan hambatan yang timbul dalam proses penanggulangan tersebut.

Terbitnya buku ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat, kagum, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mendidik, membimbing, mendampingi, serta memberi peluang kepada penulis, sehingga penulis bisa mewujudkan buku kecil dan sangat sederhana ini. *Pertama*, ucapan terima kasih dan doa yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Direktur Pascasarjana, Universitas Hindu Indonesia (Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si) yang telah memberikan

bantuan dana dan dorongan moral dalam proses penerbitan buku kecil ini. Ucapan terima kasih dan doa serupa penulis juga sampaikan kepada Bapak Dr. Drs., I Wayan Budi Utama, M.Si., Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S., Bapak Dr. Drs. I Wayan Winaja, M.Si., Bapak Dr. Drs., I Wayan Subrata, M.Ag., Ibu Dr. Dra. Ni Made Indiani, M.Si; Bapak Dr., Drs, I Wayan Paramartha, S.H., M. Pd., Bapak Dr. Drs. I Made Nada Atmaja, M.Si. yang telah menyemangati penulis dalam berkarya.

Sebuah nama yang tidak pernah penulis lupakan dan pantas diberikan ucapan terima kasih yang tulus adalah I Wayan Gampil Suardana, S.Pd. seorang guru yang pernah mengajar penulis sewaktu masih duduk di bangku SLTP, yakni di SMP N 1 Tegallalang yang dengan ketulusan hati dan petuah-petuahnya yang sangat menyejukkan bagaikan embun di pagi hari, telah menyemangati, memotivasi, dan memberi dorongan moral kepada penulis sehingga bisa sampai ke jenjang ini.

Demikian pula, nama lain yang tidak akan pernah penulis lupakan dan patut diberikan doa dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya adalah Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja, M.A. yang juga mempunyai andil besar atas keberhasilan penulis dalam menerbitkan buku kecil ini. Sebab melalui bimbingan beliau saat penulis menyelesaikan tesis di Program Magister Kajian Budaya UNUD dan Program Doktor pada institusi yang sama, penulis banyak dibimbing, diarahkan, dan dimotivasi dalam memahami berbagai perkembangan teori-teori sosial kontemporer yang sangat bermanfaat bagi penulisan buku ini. Satu nama yang tidak mungkin juga penulis lupakan dan sangat penting disebut dalam buku ini adalah Mrs. Judy Sonnesson, yakni seorang guru Bahasa Inggris dari Melbourn Australia, yang pernah mengajar di SMP N 1 Tegallalang pada tahun 1977 yang telah berkenan membiayai studi penulis selama menuntut ilmu di bangku SLTA. Tanpa bantuan dan dorongan moral yang beliau berikan mungkin saja penulis tidak akan pernah sampai ke jenjang ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini izinkan penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya.

Keberhasilan penulis sampai di jenjang ini, juga tidak bisa dilepaskan dari peran orang-orang di sekeliling diri penulis seperti ayahanda tercinta I Nyoman Sukra (almarhum), dan ibunda tercinta Ni Wayan Cangkir (almarhumah) yang dengan keluguan dan ketekunannya berhasil mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang yang penulis alami saat ini, meskipun beliau tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bangku sekolah. Kekokohan dan keteguhan hatinya mendorong penulis untuk terus mengikuti pendidikan, terlihat ketika penulis masih kecil dengan empat orang bersaudara ditinggal oleh ayahanda untuk selama-lamanya meskipun di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang teramat

sangat ibunda tetap mendorong dan mengizinkan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan.

Istri tercinta Ir. Ni Nengah Srianti, tampaknya juga penting disebut dan diberikan ucapan terima kasih yang tulus karena dengan kesabaran dan keteguhan hatinya telah berkenan mendampingi dan menyemangati penulis sampai saat ini. Dengan ketajaman naluri seorang jurnalis, Ni Nengah Srianti juga sering memberikan masukan yang sangat konstruktif bagi penyempurnaan buku kecil ini. Demikian pula Dr. Putu Edy Suardiyana Putra, S.Com.,M.Com., Ph.D putra sulung dan I Made Gede Dwipayana Putra, S.Ked putra kedua sekaligus anak bungsu dari penulis juga penting disebut dan diberikan ucapan terima kasih karena telah banyak membantu dalam hal ketik-mengetik di komputer.

Demikian pula Putu Pradnya Kavindra dan Made Mia Ananza dua cucu dari anak penulis yang pertama tampaknya penting juga disebut dan diberikan ucapan terima kasih karena dengan karakternya yang sangat lucu telah menyemangati penulis dalam berkarya, sehingga penulis dapat menghasilkan beberapa karya yang sangat berarti bagi kehidupan diri penulis.

Tradisi menjalani kehidupan akademik yang sarat dengan nilai kedisiplinan juga telah ditanamkan sebelumnya oleh para guru dan dosen penulis, mulai dari guru di tingkat SD sampai perguruan tinggi di antaranya I Wayan Wija (mantan guru SD Negeri 1 Kedisan), I Made Rihuh (almarhum) mantan guru SD Negeri 1 Kedisan), I Wayan Kota (mantan guru SD Negeri 1 Kedisan) I Wayan Atjin Tisna (almarhum) mantan guru dan sekaligus kepala sekolah SMP Negeri 1 Tegallalang; I Dewa Made Suparsa (almarhum) mantan guru SMP Negeri 1 Tegallalang; A.A. Alit Atmaja mantan guru SMP Negeri 1 Tegallalang; I Gusti Made Artana, mantan guru SMP Negeri 1 Tegallalang; I Gede Putu Dirga (almarhum) mantan Kepala TGA Saraswati Denpasar), dan Drs. I Gde Widana (almarhum) mantan dosen FKIP UNUD Singaraja. Kepada beliau-beliau ini penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebab tanpa peran beliau-beliau ini tidak mungkin penulis sampai ke jenjang ini. Kesederhanaan dan disiplin khas yang masih penulis rasakan hingga kini telah ditanamkan oleh Drs. I Ketut Wirata, M.Si. (almarhum) mantan guru penulis di TGA Saraswati Denpasar, yang juga paman penulis, kepada beliau secara khusus melalui kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan doa yang setulus-tulusnya.

Selain orang-orang yang telah disebutkan di atas, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu, mendorong dan membimbing penulis, sehingga bisa sampai ke jenjang ini, meskipun tidak

mungkin penulis sebut namanya satu per satu. Semoga amal dan budi baik semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama ini mendapat balasan yang sebanding dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) dan kepada penulis sekeluarga.

***Om Santih, Santih, Santih, Om***

Denpasar, Desember 2019

Penulis,

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II KONSEP DAN TEORI.....	5
2.1 Konsep .....	8
2.2 Teori .....	9
BAB III PURA BESAKIH : EKOLOGI DAN DEMOGRAFI .....	15
3.1 Ekologi Desa Besakih .....	16
3.2 Demografi Desa Besakih .....	18
BAB IV GLOBALISASI DAN MODERNISASI MELANDA BALI.....	20
4.1 Ciri-Ciri Masyarakat Modern .....	20
4.2 Gaya Hidup Konsumerisme .....	24
4.3 Barang Plastik, Praktis dan Modern .....	29
4.4 Masyarakat Bali Terjerat Ideologi <i>McDonaldisasi</i> .....	33
BAB V POLA PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK PADA UPACARA <i>PIODALAN</i> DI PURA BESAKIH.....	39
5.1 Karakteristik Organisasi dan Teknologi Penanggulangan Sampah di Pura Besakih .....	39
A. Struktur Organisasi .....	39
B. Teknologi Organisasi .....	42
C. Karakteristik Pekerja .....	46
5.2 Kebijakan dan Praktik Manajemen.....	50
BAB VI HAMBATAN DALAM MENANGGULANGI SAMPAH PLASTIK PADA UPACARA PIODALAN DI PURA BESAKIH .....	54
6.1 Hambatan Tenaga Kerja.....	54
6.2 Hambatan dari segi Peran Serta Masyarakat.....	56
6.3 Temuan dan Prospek Temuan .....	60
BAB VII PENUTUP.....	62
7.1 Simpulan .....	62
7.2 Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65



## **BAB I PENDAHULUAN**

Di era modernisasi ini, istilah pembangunan seolah-olah sudah menjadi sebuah mitos dan seakan telah mengalami sakralisasi. Jika meminjam gagasan Nugroho (2001:111) pembangunan itu sendiri diartikan sebuah proses perubahan sosial dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik. Jadi, di balik istilah pembangunan seolah-olah tersembunyi ‘nilai kebaikan’. Oleh karena tujuan dan anggapan dasarnya baik, maka proses pembangunan cenderung mengizinkan pengorbanan-pengorbanan tertentu. Misalnya, dalam hal tertentu berbagai nilai kearifan lokal yang sesungguhnya mempunyai nilai *adiluhung* yang tinggi pun bisa dikorbankan demi labeling pembangunan. Bahkan di kalangan negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia pembangunan dinilai sebagai resep mujarab yang bisa memecahkan segala masalah yang dihadapi manusia guna mewujudkan masyarakat adil-makmur yang berkemodernan (Atmadja, 2005 : 6).

Tolok ukur masyarakat adil makmur dan berkemodernan adalah masyarakat yang berkebudayaan Barat. Hal ini sejalan pula dengan gagasan Wilbert Moore (dalam Sztomka, 2004:152) yang menyatakan bahwa modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau pra modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia Barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil. Pemaknaan seperti itu, dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat modern yang ditandai oleh pengadopsian kebudayaan Barat yang oleh Sianipar (2004) disebut sebagai kebudayaan global putih.

Selain itu, masyarakat modern juga ditandai dengan tingginya pemanfaatan berbagai peralatan yang terbuat dari plastik. Oleh karenanya Atmadja (2005:315) mengatakan bahwa ruang dan waktu di mana kita hidup saat ini bisa disebut zaman plastik. Sebab hampir sebagian besar teknologi atau peralatan yang kita gunakan, baik teknologi canggih maupun teknologi sederhana terbuat dan atau mengandung unsur plastik. Plastik bisa ditransformasikan menjadi aneka barang yang penampakannya tidak saja indah atau bahkan lebih indah dari aslinya, tetapi juga memiliki nilai kepraktisan sehingga cocok dengan tuntutan modernitas yang mendambakan pola kehidupan yang praktis dan ekonomis.

Hal ini pula yang mendorong masyarakat untuk mentransformasikan berbagai peralatan yang digunakan dalam hidup ini dari peralatan yang sebelumnya tidak terbuat dari plastik kini cenderung menggunakan berbagai peralatan yang terbuat dari plastik. Misalnya, dalam hal perabotan rumah tangga, piring dan mangkok yang semula terbuat dari bahan keramik atau mungkin juga dari batok kelapa diganti dengan bahan plastik, sendok yang

terbuat dari stenles atau aluminium diganti dengan plastik, dan banyak lagi perabotan rumah tangga lainnya yang semula tidak terbuat dari plastik kini dibuat dari plastik.

Bukan hanya itu, proses transformasi ini dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Bali tampaknya tidak hanya menyasar perabotan rumah tangga, tetapi juga telah menyasar berbagai aspek kehidupan, termasuk perlengkapan sarana upacara keagamaan. Misalnya, pada masyarakat Hindu di Bali sekarang banyak bisa ditemukan sarana upacara keagamaan yang terbuat dari plastik seperti, bunga-bunga yang di era sebelumnya masyarakat cenderung menggunakan bunga segar yang langsung diambil dari alam, kini selain menggunakan bunga-bunga segar masyarakat juga sering menggunakan bunga-bunga yang terbuat dari plastik.

Selain itu, jajan yang dijadikan sarana pembuatan *banten* dalam pelaksanaan berbagai upacara keagamaan di Bali, kini tidak jarang dibungkus dengan plastik. Demikian pula untuk membawa perlengkapan/sarana persembahyangan seperti, bunga, *kuangen*, *dupa*, dan *canang sari*, masyarakat seringkali menggunakan tas yang terbuat dari plastik, yang sering disebut tas *kresek*, seperti tampak pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1: Sampah berserakan di Pelataran Pura Besakih saat upacara piodalan (gambar ini diambil pada tanggal 8 April 2010 saat Bhatara Turun Kabeh)  
(Dok Suda)**



**Gambar 1.2: Masyarakat membawa perlengkapan sembahyang dengan tas plastik pada saat piodalan di Pura Besakih  
(Dok Suda)**

Kecenderungan masyarakat memakai berbagai peralatan yang terbuat dari plastik selain karena harganya relatif murah, pemanfaatannya juga sangat praktis (sesuai dengan tuntutan pola hidup modern). Artinya, setelah persembahyangan selesai tasnya bisa dibuang, sehingga tidak perlu repot-repot lagi membawanya pulang. Di satu sisi memang harus diakui pemakaian perabotan yang terbuat dari plastik memberikan manfaat praktis yang sangat tinggi, akan tetapi di sisi lain limbah plastik jika tidak ditanggulangi secara profesional bukan tidak mungkin dapat mengakibatkan petaka yang dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.

Dikatakan demikian karena limbah plastik merupakan salah satu limbah yang bertipe sangat sulit terurai dalam tanah (*undergradable*). Selain itu sampah plastik juga dapat menjadi biang utama terjadinya banjir, dan dapat meracuni kandungan air jika dikubur di dalam tanah atau jika dibuang ke sungai (Lili Lengkana, 2009:1). Adanya kondisi demikian, ditambah semakin meningkatnya jumlah penduduk dengan segala aktivitas yang dilakukan telah mendorong terjadinya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, atau pun udara yang berasal dari emisi gas buang.

Sejalan dengan itu, Suarna dan Adnyana (t.t. : 8) mengatakan bahwa terjadinya degradasi kualitas lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan jumlah penduduk dan aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga karena apresiasi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih sangat lemah. Di sisi lain, sikap dan tanggung jawab masyarakat produsen (pemilik pabrik) dan masyarakat konsumen (penikmat barang-barang hasil produksi pabrik) belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan. Hal ini terbukti dari tingginya minat masyarakat membeli barang-barang yang menggunakan kemasan kertas, kantong plastik, kaleng, dan berbagai bentuk kemasan lainnya, termasuk untuk keperluan upacara keagamaan. Padahal limbah dari kemasan model ini bersifat *undergradable* (tidak terurai oleh alam), yang akhirnya harus dibuang ke lingkungan begitu saja tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi.

Fenomena transformasi dari barang non-plastik ke barang-barang yang terbuat dari plastik dan pola penanganan sampah pada upacara *piodalan* di Pura Besakih, sangat menarik untuk diteliti karena ribuan umat dari berbagai daerah di Bali, bahkan dari luar Bali *pedek* (datang untuk sembahyang) ke Pura Besakih pada setiap upacara *piodalan*, tentu dengan sarana *banten* masing-masing yang tidak luput dari pemakaian berbagai sarana yang menggunakan bahan plastik. Selesai melakukan persembahyangan masyarakat akhirnya membuang sampah begitu saja, sehingga hal ini menjadi masalah tersendiri dalam konteks kelestarian lingkungan. Di sisi lain, sistem penanganan dan pengelolaan limbah padat

(sampah) di Bali belum mengalami kemajuan berarti, sehingga menyebabkan volume limbah terus mengalami peningkatan yang tajam.

Mengingat keberadaan sampah plastik yang begitu sangat memprihatinkan, Gubernur Bali I Wayan Koster, pada 24 Desember 2018 akhirnya mengumumkan larangan penggunaan kantong plastik, Styrofoam, dan sedotan plastik. Larangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 97 tahun 2018 untuk menekan kemunculan sampah plastik yang sangat mengganggu kelestarian lingkungan. Namun, penanggulangan sampah plastik sampai saat ini masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian yang serius, sebab pengelolaan sampah selama ini, masih bertumpu pada satu penyelesaian di tingkat pengumpulan akhir (*end pipe*) yang disebut TPA (tempat pembuangan akhir) dengan menggunakan sistem *open dumping*. Upaya-upaya pengurangan sampah (*reduce*) dari sumber penghasil sampah masih belum banyak memberikan hasil. Ditambah kesadaran masyarakat untuk berperilaku ‘‘mengurangi sampah’’, apalagi memilah sampah organik dengan sampah anorganik masih jauh dari harapan. Akibatnya, semua jenis sampah harus terangkut dan tertimbun di lokasi pembuangan akhir yang disebut TPA.

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA, KONSEP, DAN TEORI**

#### **2.1 Studi Pustaka**

Dari hasil penelusuran terhadap beberapa kajian sebelumnya, ada beberapa hasil studi terdahulu yang terkait dengan persoalan ini. Kajian Gunadha dan Dharmika (t.t) yang berjudul “Kerangka Konseptual Hindu mengenai Hubungan Timbal Balik antara Manusia dan Lingkungan”, mencoba mencermati berbagai kerangka konseptual yang dimiliki umat Hindu dalam konteks pelestarian lingkungan. Misalnya, upacara *Tumpek Bubuh* pada masyarakat Bali yang dilaksanakan pada hari *Saniscara Kliwon wuku Wariga* setiap 210 hari sekali, dapat ditanggapi sebagai usaha untuk melestarikan lingkungan.

Upacara ini dilakukan dalam rangka pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai *Dewa Sangkara*, yakni Dewanya tumbuh-tumbuhan. Dasar dilaksanakan upacara ini adalah pemikiran filosofi untuk ‘memberikan sebelum menikmati’. Dalam konteks pelestarian sumber daya hayati hal ini bermakna bahwa sebelum manusia menikmati atau menggunakan sesuatu (baca: hasil-hasil alam), harus didahului dengan kegiatan penanaman atau pemeliharaan. Demikian juga dengan pelaksanaan upacara *Tumpek Kandang* yang diselenggarakan pada hari *Saniscara Kliwon wuku Uye* untuk menyatakan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai *Dewa Pasupati* pencipta binatang atau hewan-hewan piaraan.

Selain itu, pada masyarakat Bali juga ada kepercayaan tidak boleh menebang pohon bambu pada hari Minggu, tidak boleh menebang kayu untuk bangunan jika harinya berisi ‘*was*’ (menurut kalender Bali hari *was* datang setiap enam hari sekali) dan banyak lagi nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang terkait dengan konsep pelestarian lingkungan. Masyarakat Hindu di Bali juga menyadari bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya.

Kajian ini memperlihatkan bahwa secara konseptual sebenarnya masyarakat Hindu di Bali memiliki banyak nilai kearifan lokal dalam konteks pelestarian lingkungan. Kepemilikan kerangka konseptual seperti itu, ternyata belum banyak memberikan manfaat secara pragmatis kepada masyarakat. Kendati dalam beberapa hal kerangka konsep pelestarian lingkungan ala umat Hindu, seperti larangan menebang pohon pada hari-hari tertentu, melakukan pemeliharaan secara ritual terhadap tumbuh-tumbuhan pada hari *Tumpek*

*Wariga*, dan pemeliharaan secara ritual terhadap binatang pada hari *Tumpek Uye*, menunjukkan tanda yang menggembirakan. Namun, secara praktik pelestarian lingkungan pada masyarakat Bali masih jauh dari harapan.

Beberapa konsep yang digunakan Gundha dan Dharmika di atas, seperti konsep memberi sebelum menikmati, larangan menebang pohon pada hari-hari tertentu bisa juga diaplikasikan dalam kaitan dengan proses transformasi barang non-plastik ke barang-barang yang terbuat dari plastik dan pola penanggulangan sampah dalam rangka pelestarian lingkungan. Faktor-faktor tersebut banyak berkaitan dengan upaya pemeliharaan lingkungan seperti, tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik sebab hal ini sangat terkait dengan kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan.

Selanjutnya Suda (2001) juga mengkaji konsep pelestarian lingkungan menurut Hindu dengan judul “Perwujudan Sistem Nilai Melalui Simbol dalam Kehidupan Umat Hindu di Bali”. Dalam kajiannya, Suda menegaskan, pemakaian *saput poleng* pada pohon di Bali secara sosiologi hukum mengandung makna pelestarian lingkungan hidup. Dikatakan demikian sebab jika masyarakat melihat pohon yang dililit dengan *saput poleng*, jangankan menebang pohonnya, ingin memetik daun atau rantingnya saja masyarakat tidak berani sembarangan. Jika masyarakat ingin memetik daun atau rantingnya, apalagi menebang pohonnya masyarakat terlebih dahulu harus melakukan permohonan, baik secara *sekala* maupun *niskala*. Permohonan secara *sekala* artinya, meminta izin langsung kepada pemilik atau pemelihara pohon itu. Permohonan secara *niskala* berarti melakukan persembahyangan di bawah pohon itu, yang tidak lain sebagai bentuk *yadnya* kepada Tuhan sebagai cetusan rasa *bhakti* dan ucapan terima kasih atas karunia-Nya berupa pohon besar yang dapat membantu kehidupan manusia di bumi ini.

Beberapa konsep yang digunakan Suda juga dapat membantu menjembatani pemecahan permasalahan dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan pola penanggulangan sampah pada upacara *Piodalan* di Pura Besakih. Misalnya, mengenai etika umat Hindu dalam melakukan penebangan terhadap pohon, yakni sebelum menebang pohon didahului dengan permohonan baik secara *sekala* maupun *niskala*. Jika etika ini diterapkan dalam konteks penanggulangan sampah tentu masyarakat Hindu tidak akan berani membuang sampah secara sembarangan tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik secara *sekala* maupun *niskala*.

Suarna dan Sandi Adnyana (t.t) dalam kajiannya berjudul “Permasalahan dan Kerusakan lingkungan Hidup”, menyoroti berbagai kerusakan lingkungan telah terjadi di Indonesia termasuk Bali. Di antaranya, kerusakan lingkungan hutan, penurunan

keanekaragaman hayati, lahan kritis, kerusakan akibat penambangan galian C, kerusakan karena erosi, dan lain-lain termasuk permasalahan sampah dan limbah padat. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi telah memberikan tekanan yang besar terhadap lingkungan. Jumlah penduduk yang besar dengan segala aktivitas yang dilakukan telah mendorong terjadinya berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran air, tanah, dan udara yang berasal dari emisi gas buang. Meningkatnya pencemaran tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat di wilayah perkotaan yang merupakan pusat akumulasi dari berbagai aktivitas dan mobilitas manusia, sehingga secara nyata telah menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan.

Suarna juga menjelaskan bagaimana proses pengelolaan sampah yang dilakukan pihak terkait di provinsi Bali ini masih bertumpu pada satu penyelesaian di tingkat akhir yang disebut TPA (tempat pembuangan akhir). Sementara upaya-upaya pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah masih belum banyak memberikan hasil. Demikian pula kesadaran masyarakat untuk berperilaku mengurangi sampah apalagi memilah sampah, masih jauh dari harapan. Jadi, beberapa temuan yang dikemukakan oleh Suarna, seperti pola penanganan sampah yang bertumpu pada satu penyelesaian di tingkat pengumpulan akhir (TPA) tampaknya dapat dijadikan acuan dalam proses pemecahan masalah penelitian ini khususnya mengenai pola penanggulangan sampah pada upacara *Piodalan* di Pura Besakih.

Demikian pula Atmadja (2010) dalam kajiannya berjudul '*Ajeg Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*' juga menyinggung tentang kekerasan masyarakat Bali terhadap lingkungannya. Dengan mengacu pada Kraf (2002) Atmadja mengatakan bahwa etika lingkungan *ekosentrisme* atau holistik yang dianut oleh manusia Bali telah berubah menjadi etika *antroposentrisme*. Artinya, manusia tidak hanya mengambil jarak dengan lingkungan alam, tetapi juga menganggap dirinya sebagai pusat dari segala-galanya. Atau dengan paparan yang tidak jauh berbeda, Chang (2000) mengatakan, modernisasi mengakibatkan sistem pemikiran ekologis berubah menjadi sistem filsafat *utilitarianisme* dan pragmatisme. Artinya, manusia yang menganut filsafat ini selalu berusaha mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan tanpa memperhatikan dampak, terutama dampak negatifnya.

Konsep peralihan etika lingkungan dari etika *ekosentrisme* berubah menjadi *antroposentrisme* yang terjadi pada masyarakat Bali sebagaimana digambarkan Atmdja di atas tampaknya dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelusuran terhadap sejauh mana etika *ekonsentrisme* pada masyarakat Bali telah berubah menjadi etika *antroposentrisme*, sehingga hal ini nantinya dapat dijadikan rujukan dalam konteks

pemecahan masalah penelitian ini khususnya masalah yang pertama, yakni alasan masyarakat Bali mengadopsi berbagai barang yang terbuat dari plastik yang dapat berdampak negatif bagi pelestarian lingkungan.

Akan tetapi dari beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas tidak satu pun yang membahas mengapa masyarakat Bali begitu mudahnya mengadopsi berbagai barang yang terbuat dari plastik, padahal limbah plastik sangat sulit ditanggulangi karena bersifat *undergradable* dan tidak ada satupun kajian sebelumnya yang membahas secara spesifik bagaimana pola penanggulangan sampah plastik pada setiap upacara piodalan di Pura Besakih, Karangasem Bali.

## 2.1 Konsep

Menurut Atmadja (2005:286) citra lingkungan masyarakat Bali, selain bersumberkan pada pengetahuan lokal, juga bersumber pada ajaran Agama Hindu. Menurut pandangan Hindu citra lingkungan masyarakat Bali mengarah kepada *ekosentrisme*. Artinya, masyarakat Bali melihat bahwa manusia dan alam dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mereka tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Terkait dengan persoalan lingkungan, Gunadha dan Dharmika (t.t:8) menegaskan bahwa ada keyakinan pada masyarakat Hindu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan menggunakan lima benih atau unsur tenaga yang disebut *Pancatanmatra* yang terdiri atas; (1) *Gandhatanmatra* adalah benih dari unsur *pertiwi*; (2) *Rasatanmatra* adalah benih dari unsur *apah*; (3) *Rupatanmatra* adalah benih dari unsur *teja*; (4) *Spasatanmatra* adalah benih dari unsur *bayu*; dan (5) *Sabdatanmatra* adalah benih dari unsur *akasa*. Kelima unsur yang disebut *pancatanmatra* itu, kemudian berubah menjadi atom-atom yang disebut *paramanu*. Selanjutnya, dari *paramanu* itu, lalu muncullah unsur-unsur benda yang disebut *Pancamahabhuta* (lima unsur yang maha ada), yaitu (1) *Pertiwi* adalah unsur zat padat; (2) *Apah* adalah unsur zat cair; (3) *Teja* adalah unsur sinar atau panas; (4) *Bayu* adalah unsur udara; dan (5) *Akasa* adalah unsur *ether*.

Interaksi antara alam dan manusia, antara *buana agung* dan *buana alit*, antara *makrokosmos* dan *mikrokosmos* menunjukkan adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Dalam arti antara manusia dan lingkungan ada hubungan timbal balik yang saling berhubungan satu sama lain. Terkait dengan pola pengelolaan lingkungan Geertz (1999) mengatakan bahwa pengelolaan lingkungan terkait pula dengan sistem budaya atau superstruktur ideologi, nilai, norma, agama, kepercayaan, mitos, dan lain-lain. Sistem budaya



memberikan resep bertindak, baik pada struktur sosial maupun hubungan mereka dengan alam *sekala* dan *niskala* dengan menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena itu hubungan antarkomponen tersebut, tidak bersifat acak melainkan berketeraturan karena adanya pola dari dan pola untuk yang terakumulasi pada superstruktur ideologi yang mereka miliki.

Jadi, konsep pengelolaan lingkungan atau citra lingkungan holistik pada masyarakat Bali terkristalisasi pada ideologi *Tri Hita Karana* yang mengidealkan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia pada struktur sosial (*pawongan*), hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam *sekala* (*palemahan*) dan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya atau alam *niskala* (*Parhyangan*).

Dengan demikian kerangka konsep yang dapat dikemukakan dalam kajian ini adalah konsep tentang pandangan masyarakat Hindu di Bali tentang lingkungannya dan bagaimana lingkungan itu dikelola berdasarkan ideologi *Tri Hita Karana*, termasuk di dalamnya bagaimana masyarakat Bali mengelola sampah, baik sampah organik maupun sampah *anorganik*, sehingga harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan lingkungannya tetap dapat terjaga.

## **2.2 Teori**

Untuk memperoleh pemahaman tingkat kedua, yakni deskripsi analisis mengenai transformasi barang-barang non-plastik ke barang yang terbuat dari plastik dan pola penanggulangan sampah, khususnya pada upacara *Piodalan* di Pura Besakih melalui penelitian kualitatif mutlak memerlukan kerangka teori. Mengingat, persoalan transformasi barang non-plastik ke barang yang terbuat dari plastik dan pola pengagulangan sampah sifatnya sangat kompleks, maka beberapa teori yang dapat digunakan di sini adalah sebagai berikut.

### **A. Teori Pembangunan dan Modernisasi**

Istilah pembangunan mula-mula diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, pada tanggal 20 Januari 1949. Pada saat itu, Harry S. Truman, melihat kondisi yang terjadi di Amerika bagian Selatan sebagai suatu daerah yang memerlukan pembangunan dan disebutnya sebagai ‘kawasan

terbelakang'' (*underdeveloped areas*). Meski pun pada mulanya ia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan kawasan Amerika bagian Selatan, namun kemudian konsep ''pembangunan kawasan terbelakang'' di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi politik Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an (Nugroho, 2006 : 13).

Sejalan dengan Nugroho Sianipar (dalam Atmadja, 2010:8) mengatakan bahwa pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dinilai sebagai resep yang dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan modern, dengan tolok ukurnya adalah kebudayaan Barat atau kebudayaan global putih.

Oleh karena itu, pembangunanisme tidak saja dipandang sebagai terapi, tetapi juga diposisikan seperti agama baru yang menyaingi agama lama, misalnya agama Hindu, Islam, Kristen, Budha, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan gagasan Wilbert Moore (dalam Sztomka, 2004:152) yang mengatakan bahwa modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau pramodern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai dunia Barat, yang ekonominya makmur dan politiknya stabil.

Modernisasi yang mengarah pada konstruksi budaya global putih berkaitan pula dengan proses globalisasi yang melanda dunia saat ini dengan begitu kuatnya. Salah satu ciri utama dari masyarakat global adalah kuatnya pengaruh konsumerisme melanda kehidupan masyarakat atas barang-barang konsumsi yang melimpah di pasar. Terkait dengan masyarakat konsumsi Hertz (2004) mengatakan bahwa globalisasi produksi atau pun globalisasi informasi mengakibatkan masyarakat menjadi bagian dari *global village*. Berkenaan dengan itu, maka konsumerisme sebagai rohnya ideologi pasar telah berkembang luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Bali.

Hal ini tampak dari bagaimana masyarakat Bali dalam mengonsumsi berbagai barang produksi demi sebuah gaya hidup, oleh karenanya Atmadja (2005:336) mengatakan saya ada karena saya mengonsumsi. Kenyataan ini menandakan bahwa arah imperialisme telah berubah, dari semula menekankan pada pendudukan wilayah secara fisik, kini lebih menekankan pada imperialisme gaya baru, yakni imperialisme ekonomi dan imperialisme cultural (Ritzer dan Goodmen, 2003; dan Fakih, 2004).

Tujuan imperialisme cultural adalah tidak saja menjadikan kita sebagai manusia yang berbudaya putih global, tetapi juga menciptakan kita ketergantungan pada negara-negara kapitalisme global. Hal ini terbukti disadari atau tidak dalam benak kita melekat anggapan bahwa jika kita bisa mengonsumsi sebanyak mungkin budaya global, maka kita akan puas dan bangga. Oleh karena itu, tanpa disadari budaya global ternyata menerpa pula sistem ritual

orang Bali. Peralatan ritual atau apa yang dipersembahkan kepada para dewa atau roh leluhur kurang mantap jika tidak menyertakan produk-produk global, seperti buah-buahan termasuk barang-barang yang terbuat dari plastik.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat Bali mengalami proses transformasi dari barang non-plastik menuju barang yang terbuat dari plastik, yakni mengganti berbagai teknologi atau peralatan yang semula tidak menggunakan plastik kini diganti dengan berbagai peralatan yang terbuat dari plastik. Hal ini dilakukan selain karena pertimbangan pragmatis juga masyarakat kini terjebak pada persoalan gaya hidup. Hidup ini dianggap semakin modern jika kita bisa mengikuti perkembangan budaya global putih, sebaliknya jika tidak bisa mengikuti kita dianggap kuno atau ketinggalan zaman.

Dalam perkembangan pembangunan model ini ternyata tidak hanya bersentuhan dengan kehidupan dunia material, seperti cara berpakaian (*fashionable*), persoalan makanan, dan yang lain-lain, tetapi telah merembes pula pada persoalan-persoalan psikologis, seperti dalam hal manusia menikmati rasa keindahan, rasa aman, dan tidak terkecuali menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya (sistem ritual). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Atmadja (2005:337) sebagai berikut.

“Peralatan ritual atau apa yang dipersembahkan masyarakat Bali kepada para dewa atau roh leluhurnya, kurang mantap jika tidak menyertakan produk global, misalnya buah-buahan, jajan, dan lain-lain. Buah-buahan global sangat disukai, tidak semata-mata sebagai wujud *bhakti* orang Bali yang mengharuskan mereka mempersembahkan yang terbaik dan yang tersempurna, kepada para dewa atau roh leluhur yang mereka puja, tetapi juga karena kita merasa bangga jika mengonsumsi buah-buahan global”.

Jika mengacu pada Atmadja (2005:337) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa, betapa pembangunanisme telah melahirkan gaya hidup yang saat ini pengaruhnya telah menyasar kehidupan ritual masyarakat Bali. Akibatnya, ketika kita mengadopsi begitu saja produk-produk budaya global, tanpa diimbangi dengan pengetahuan untuk menetralsir berbagai dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya, maka bukan tidak mungkin hal ini dapat menjadi bencana bagi kehidupan umat manusia.

Teori ini digunakan karena dapat menggambarkan bagaimana keterjeratan masyarakat terhadap budaya global putih, bahkan dalam proses penerimaan masyarakat terhadap budaya ini sering dilakukan tanpa seleksi, sementara di sisi lain apresiasi masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan masih sangat lemah. Hal demikian dapat berakibat fatal bagi kelestarian lingkungan sebab limbah dari barang-barang produksi budaya global, seperti

berbagai kemasan yang menggunakan kertas, kantong plastik, kaleng, dan berbagai bentuk kemasan lainnya bersifat ‘*undegradable*’ (tidak terurai oleh alam) yang akhirnya harus di buang ke lingkungan begitu saja tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi.

## **B. Teori Struktural Fungsional**

Asumsi dasar teori ini adalah anggapan bahwa ada kesamaan antara organisme biologis dengan kehidupan sosial. Tokoh penting dari teori ini adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Menurut Spencer masyarakat manusia adalah seperti suatu organisme. Jadi, pada intinya badan manusia dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri atas organ-organ yang saling berhubungan satu sama lainnya. Seperti, jantung, paru-paru, otak, ginjal, dan seterusnya. Setiap organ mempunyai satu atau beberapa fungsi tertentu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organ-organ lain bahkan seluruh organisme tubuh. Organ-organ tersebut merupakan suatu struktur dari seluruh organisme tubuh. Demikian pula lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dianggap sama dengan organ-organ tubuh. Lembaga sosial sebagai unsur struktur, dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat (Simanjatak, 1985:70).

Berangkat dari pandangan Comte dan Spencer di atas, maka Pura sebagai tempat berlangsungnya upacara keagamaan juga dapat dipandang sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Boon sebagaimana dikutip Sudaratmaja (2003:26) mengatakan bahwa Pura tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali, karena setiap aspek kehidupan termasuk sosial dan ekonomi berhubungan langsung dengan berbagai jenis Pura. Pekarangan individu, wilayah desa, kesatuan kabupaten, dan propinsi, pasar, serta lahan persawahan juga ditandai oleh bentuk Pura yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing.

Agar setiap lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dijaga harmonisasi hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah lembaga kemasyarakatan, maka antar lembaga kemasyarakatan tersebut harus dapat saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lainnya. Misalnya, dalam sebuah proses pelaksanaan upacara keagamaan seharusnya ada panitia yang bertugas sebagai penyelenggara upacara, ada lembaga ekonomi yang bertugas men-*support* pendanaan, ada lembaga keamanan yang bertugas menjaga ketertiban jalannya upacara, dan harus didukung pula oleh lembaga kebersihan yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam proses pelaksanaannya semua lembaga akan saling berkaitan satu sama lain dalam suatu sistem tertentu. Hal inilah oleh Comte dan Spencer (dalam Simanjutak, 1985 : 70) diartikan sebagai suatu sistem, yakni himpunan atau kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu atas dasar pada pola tertentu. Jadi, teori ini digunakan karena teori ini menegaskan bahwa kehidupan sosial dianggap memiliki kesamaan dengan kehidupan organisme, yakni antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai organ sosial mempunyai fungsi masing-masing dan di dalam menjalankan fungsinya harus saling bekerja sama satu sama lainnya. Demikian pula dalam konteks penanggulangan sampah pada upacara *Piodalan* di Pura Besakih, seharusnya ditangani oleh suatu lembaga khusus yang masih mempunyai kaitan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

### **C. Teori Instraksionisme Simbolik**

Intraksionisme simbolik adalah sebuah teori sosiologi yang dikemukakan oleh George Herbert Mead. Mead mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain dengan perantaraan lambang-lambang yang dimiliki bersama. Dengan perantaraan lambang-lambang tersebut, maka manusia memberikan arti pada kegiatan-kegiatannya. Mereka dapat menafsirkan keadaan dan perilaku, dengan mempergunakan lambang-lambang tersebut (Simanjutak, 1985 : 72).

Misalnya, dalam konteks penelitian ini proses transformasi barang non-plastik ke barang plastik merupakan sebuah simbol modernitas yang sering digunakan oleh masyarakat kita dewasa ini untuk menentukan identitas dirinya. Artinya, masyarakat dewasa ini cenderung menggunakan simbol-simbol pengkonsumsian produk budaya Barat sebagai identitas diri, dan menganggap jika belum bisa mengikuti/mengonsumsi budaya global (baca: budaya Barat) maka belum menjadi manusia modern. Selain itu, masyarakat kita suka memanfaatkan teknologi yang terbuat dari plastik atau yang ada unsur plastiknya karena plastik bisa ditransformasikan menjadi aneka barang yang penampakannya tidak saja indah, atau bahkan lebih indah dari aslinya, tetapi juga memiliki nilai kepraktisan sehingga cocok dengan tuntutan modernitas yang mendambakan pola kehidupan yang praktis dan ekonomis (Atmadja, 2005:315). Oleh karenanya Barthes (2004) mengatakan plastik sebagai zat ajaib atau zat magis.

Namun, di balik keajaibannya itu, plastik dapat menimbulkan masalah sampah yang luar biasa. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa *pertama*, barang yang

terbuat dari plastik banyak yang mudah rusak dan sulit untuk diperbaiki. *Kedua*, transformasi bentuk barang yang terbuat dari plastik mudah berubah. Barang plastik yang dibuat belakangan selalu lebih praktis dan lebih baik dilihat dari penampilannya, karena itu barang plastik yang lama cenderung disampahkan oleh pemiliknya. *Ketiga*, sejalan dengan perkembangan budaya instan banyak barang plastik yang hanya layak sekali pakai, lalu disampahkan.

Di sisi lain sampah plastik tergolong ke dalam sampah anorganik atau disebut pula sampah yang bersifat *non gradable* (sulit diurai oleh alam). Sebaliknya, jika sampah plastik dibakar ternyata sangat berbahaya, hal ini terungkap dari hasil penelitian di Jepang yang menunjukkan bahwa pembakaran plastik yang dilakukan di rumah, berpotensi menyebabkan kemandulan pada wanita atau sulit melahirkan pada saat mengalami kehamilan (*Bali Post*, dalam Atmadja, 2005:317).

Jadi teori ini digunakan karena mempunyai relevansi sebagai berikut. Asumsi dasar teori intraksionisme simbolik mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain dengan perantaraan lambang-lambang yang dimiliki bersama. Dengan perantaraan lambang-lambang tersebut, maka manusia memberikan arti pada kegiatan-kegiatannya. Mereka dapat menafsirkan keadaan dan perilaku, dengan menggunakan lambang-lambang tersebut. Sementara penelitian ini ingin mengungkap mengapa masyarakat begitu mudah melakukan transformasi dari barang non-plastik ke barang yang terbuat dari plastik, bahkan pada aktivitas yang menyangkut ranah superstruktur ideologis, yakni upacara keagamaan (sistem ritual). Hal ini mudah dipahami karena masyarakat dewasa ini terjerat pada pola kehidupan praktis dan ekonomis sebagai lambang kehidupan modernitas.

### **BAB III**

#### **PURA BESAKIH :**

#### **EKOLOGI DAN DEMOGRAFI**

Pura Besakih terletak di wilayah Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura ini terletak pada ketinggian kurang lebih 3.000 kaki di lereng Gunung Agung dan berdiri kokoh membelakangi gunung di satu sisi dan di sisi lain menghadap laut pantai selatan Pulau Bali. Menurut catatan Stuart Fox (2010:3) bahwa gunung ini telah meletus berkali-kali sepanjang millennium. Potongan jalan yang dalam (lebih dari 20 meter) dekat Desa Besakih memperlihatkan lapisan demi lapisan abu dan runtuhannya vulkanik berbagai warna. Meski pun beberapa dari lapisan endapan vulkanik ini berasal dari letusan beberapa gunung sebelumnya yang ada di sekitar Gunung Agung, seperti (Gunung Batur, Rinjani, dan Tambora) tetapi Fox tetap meyakini kalau Gunung Agung ini sudah meletus berkali-kali.

Letusan-letusan awal sebagaimana disebut dalam mitos, menekankan hubungan antara gunung dan alam Dewa serta kepercayaan bahwa letusan gunung berapi merupakan perwujudan kekuatan Dewa. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, menurut kepercayaan populer pada abad-abad berikutnya, letusan gunung berapi dan bencana alam lainnya, lebih banyak dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang menyangkut para penguasa bumi. Secara historis, tidak ada informasi mengenai kegiatan-kegiatan gunung sebelum naskah lontar menyebutkan terjadinya letusan pada tahun 1543, 1615—1616, 1665, 1683—1684, dan 1710—1711. Memang tahun-tahun sebagaimana di sebutkan di atas tidak selalu dapat dipercaya, tetapi cerita-cerita setempat menunjukkan bahwa paling sedikit telah terjadi sebuah letusan yang sangat dasyat pada abad ke-17.

Dari sekian catatan tentang meletusnya Gunung Agung, yang walaupun barang kali masih banyak catatan yang tidak sempat penulis rekam, catatan yang paling dekat dengan ingatan kita adalah letusan Gunung Agung yang terjadi tahun 1963. Pada letusan kali ini terjadi gumpalan asap membara, menyerbu lereng-lereng gunung lahar terbawa air menyapu lembah-lembah sungai, menuju laut dan menghancurkan sawah-sawah serta desa-desa yang dilaluinya. Abu vulkanik menutupi sebagian besar Pulau Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Gempa mengguncang Pulau Bali, dan angka-angka kematian serta kehancuran yang dipublikasi cukup beragam, tetapi dari catatan tersebut dapat diketahui paling sedikit 1.200 orang meninggal, ribuan binatang terbunuh, 17 desa tersapu bersih dan lebih dari 50.000 ha

lahan persawahan tidak berfungsi, dan sekitar 350.000 ha lainnya terpengaruh oleh letusan tersebut (Staurt Fox, 2010 : 4).

Secara topografi Gunung Agung merupakan fitur fisik yang dominan di Bali Timur, sementara jejeran Gunung Batur (yang masih aktif), Beratan (sudah tidak aktif lagi) dan Gunung Batukaru berada di bagian Tengah dan Barat Pulau Bali. Gunung-gunung tersebut telah menimbulkan lereng landai yang begtu menonjol dan hamparan kawasan datar yang luas terdapat di sana-sini. Mengingat wilayah Indonesia pada umumnya dan Bali, khususnya berada di daerah tropis, maka hujan tropis yang biasanya lebat memasok air ke banyak sungai yang berkelok-kelok di atas tanah vulkanik yang lembut, serta membentuk hamparan jurang dan bukit-bukit kecil (*munduk*) seperti orang yang sedang menjelajahi setiap bagian lereng pegunungan. Fitur topografi *tukad* dan *munduk* yang menonjol ini membentang dari pegunungan sampai ke laut dan telah berperan penting dalam perkembangan budaya Bali sepanjang sejarahnya.

### **3.1 Ekologi Desa Besakih**

Secara administrasi Desa Besakih merupakan salah satu desa dinas dari enam desa dinas yang ada di wilayah Kecamatan Rendang, Kabupaten, Karangasem. Secara geografis Desa ini memiliki batas-batas wilayah antara lain : di sebelah Timur adalah Kecamatan Selat, di sebelah Selatan Desa Menanga, di sebelah Barat Desa Pempatan, dan di sebelah Utaranya adalah Gunung Agung (Monografi Desa dan Kelurahan Besakih, 2013:1). Penelitian yang dilakukan Fox (2010:11) menegaskan bahwa pada masa prakolonial hanya ada satu jenis desa, yang sekarang dikenal sebagai *desa adat*. Secara tradisional, administrasi pemerintahan desa ini, tidak didasarkan atas sistem birokrasi teritorial, tetapi berdasarkan sistem yang menekankan kontrol terhadap sumber daya manusia. Tataran paling rendah pada sistem ini adalah *perbekel* yang bertanggung jawab kepada *punggawa*, yang selanjutnya bertanggung jawab pada penguasa atau raja.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Kecamatan Rendang dibagi ke dalam tiga desa administratif (*perbekelan*) yakni Nongan, Pringalot (Rendang), dan Besakih. Terkait dengan keberadaan Desa Besakih secara administratif, meskipun diberi nama Besakih, tetapi kepala desanya yang disebut juga *perbekel* berturut-turut pertama tinggal di Tegenan, kemudian di Menanga. Dengan keadaan demikian maka pada tahun 1945 Menanga menggantikan Besakih sebagai nama desa administratifnya. Hal ini disebabkan karena Desa



Menanga mempunyai peranan sebagai pusat pasar lokal, dan karena kebetulan *perbekelnya* tinggal di desa tersebut.

Desa Besakih secara geografis memiliki wilayah seluas 21,23 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 6967 orang yang terdiri atas 3526 laki-laki dan 3441 orang perempuan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk desa Besakih sampai tahun 2013 mencapai lebih kurang 328 orang per km<sup>2</sup>. Desa ini terdiri atas 11 (sebelas) Dusun, yakni (1) Dusun Besakih Kanginan; (2) Dusun Besakih Kawan; (3) Dusun Kunyit; (4) Dusun Kedungdung; (5) Dusun Palak; (6) Dusun Batang; (7) Dusun Kesimpar; (8) Dusun Tembukus; (9) Dusun Angsoka; (10) Dusun Batu Madeg; dan (11) Dusun Kiduling Kerteg.

Dari segi jumlah keluarga sampai penelitian ini dilakukan Desa Besakih terdiri atas 1962 Kepala Keluarga (KK). Dari 6967 jiwa penduduk dan 1962 KK yang ada di Desa Besakih, tercatat 3 orang di antaranya memeluk agama Islam dan hanya satu orang beragama Kristen sedangkan selebihnya adalah memeluk Agama Hindu. Diterimanya penduduk pendatang untuk menetap di Desa Besakih, mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Besakih cukup terbuka untuk menerima berbagai pembaharuan, sebab masuknya orang luar ke suatu wilayah tertentu, dapat dipastikan akan membawa pengaruh tersendiri terhadap kondisi wilayah itu sendiri, seperti terhadap kebudayaan, adat-istiadat, dan bukan tidak mungkin juga bisa mempengaruhi keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat. Selain itu, masuk dan menetapnya orang-orang non-Hindu di wilayah Desa Besakih juga mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Besakih memiliki toleransi dalam kehidupan beragama yang cukup tinggi.

Karena letaknya yang cukup tinggi, yakni pada ketinggian kurang lebih 700 m di atas permukaan air laut, maka Desa Besakih secara topografi tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian basah, khususnya padi. Dengan keadaan alam seperti itu, maka jenis tanaman yang cocok ditanam di wilayah Desa Besakih adalah jagung, seluas 20 ha; tanaman ketela pohon seluas 27 ha; ketela rambat seluas 40 ha; kubis (kol) seluas 1 ha; tomat seluas 5 ha; dan tanaman cabai seluas 26 ha. Sedangkan jenis buah-buahan yang cocok ditanam di wilayah Desa Besakih meliputi, buah pisang seluas 60,35 ha; papaya 3,326 ha; jeruk seluas 7,195 ha; manggis seluas 6,745 ha; salak seluas 6,668 ha; dan alpokat seluas 40 ha.

Melihat berbagai jenis palawija dan buah-buahan bisa tumbuh dengan baik di wilayah Desa Besakih, menunjukkan bahwa Desa Besakih sesungguhnya merupakan areal pertanian yang cukup potensial. Jika hal ini bisa dikelola dengan baik, oleh masyarakat setempat, maka Desa Besakih bisa berkembang menjadi desa yang tidak hanya menggantungkan diri pada sektor pariwisata, tetapi juga menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan.

### 3.2 Demografi Desa Besakih

Sesuai data yang ada dalam demografi desa/kelurahan Besakih, keadaan penduduk hanya diklasifikasi berdasarkan kelompok umur dan kelompok tenaga kerja. Oleh karenanya dalam penelitian ini hanya digambarkan secara garis besar saja mengenai keadaan penduduk desa Besakih sesuai data yang ada. Namun, hal demikian diharapkan tidak mengurangi makna dari temuan yang didapat dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang ada maka dapat diketahui keadaan penduduk Desa Besakih dilihat dari kelompok umur berdasarkan pencatatan tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut. Anak usia 00—03 tahun berjumlah 489 orang; usia 04—06 tahun sebanyak 348 orang; usia 07—12 tahun sebanyak 613 orang; usia 13—15 tahun sebanyak 501 orang; anak usia 16—18 tahun sebanyak 385 orang dan usia 19 tahun ke atas sebanyak 4631 orang. Jika kelompok umur ini dibagi menjadi kelompok umur 0—18 tahun dan kelompok umur 19 tahun ke atas, maka didapat perbandingan angkanya 1:2 antara kelompok umur remaja ke bawah dengan kelompok umur orang dewasa.

Dilihat dari angka perbandingan tersebut, secara kuantitatif jumlah kelompok orang dewasa jauh lebih banyak dibandingkan kelompok anak usia remaja ke bawah. Hal ini mengandung makna secara kuantitatif seharusnya para orang tua (kelompok usia dewasa) mampu melakukan pembinaan dan penerusan nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi kepada generasi penerus.

Namun, karena para orang tua dewasa ini waktunya lebih banyak dimanfaatkan untuk urusan perut (baca: berkebutuhan dengan urusan ekonomi keluarga), maka sering proses transmisi nilai (*transmission of value*), dan transfer pengetahuan atas adat, budaya, dan agama (*transformation of knowledge*) di lingkungan keluarga tidak terjadi. Akibatnya, banyak anak-anak remaja sekarang yang tidak lagi memahami, nilai-nilai budaya, adat-istiadat, dan tradisi yang ada di sekitar dirinya, yang pada akhirnya dapat berakibat terjadinya *cultural lag*, di antara anak remaja dengan orang dewasa.

Mengenai keadaan penduduk Desa Besakih menurut Mata Pencahariannya, dalam Monografi Desa, ternyata tidak diklasifikasi berdasarkan jenis mata pencaharian yang ditekuni oleh setiap individu. Melainkan hanya dikategorisasi berdasarkan kelompok umur. Berangkat dari data yang ada peneliti tidak bisa menjelaskan jenis mata pencaharian yang banyak ditekuni oleh masyarakat Desa Besakih. Namun, sesuai data yang ada dalam monografi Desa tahun 2013 kelompok tenaga kerja hanya digolongkan berdasarkan kelompok umur. Adapun kelompok tenaga kerja berdasarkan atas umur di Desa Besakih dapat dirinci sebagai berikut.

(1) kelompok tenaga kerja umur 10—14 tahun sebanyak 605 orang; umur 15—19 tahun sebanyak 423 orang; umur 20—26 tahun sebanyak 875 orang; umur 27—40 tahun sebanyak 2104; umur 41—56 tahun sebanyak 1469 orang; umur 57 ke atas sebanyak 255 orang.

## **BAB IV**

### **GLOBALISASI DAN MODERNISASI MELANDA BALI**

#### **4.1 Ciri-Ciri Masyarakat Modern**

Masyarakat modern menurut Sianipar (dalam Atmadja, 2010:8) adalah masyarakat yang telah mampu mengadopsi kebudayaan Barat atau kebudayaan putih global. Hal ini sejalan dengan Wilbert Moore (dalam Sztomka, 2004:152) yang mengatakan bahwa modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau pra modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi yang menyerupai kemajuan dunia Barat. Sementara di bidang filsafat "modernisme" dimaksudkan sebuah gerakan pemikiran yang diinspirasi oleh pemikiran Descartes dan dikokohkan oleh gerakan pencerahan (*aufklarung/enlightenment*) yang mengabdikan dirinya hingga abad ke-20 melalui dominasi sains dan kapitalisme (Sugiharto, 1996 : 28).

Lebih lanjut menurut Sugiharto gambaran dunia semacam ini, serta tatanan sosial yang dihasilkannya ternyata telah melahirkan berbagai konsekuensi buruk bagi kehidupan manusia dan alam pada umumnya. Dalam konteks ini paling tidak ada enam konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh kondisi sebagaimana digambarkan di atas.

*Pertama*, pandangan dualistik dari paham modernisme itu telah membagi seluruh realitas menjadi subjek dan objek, spiritual-material, manusia-dunia, dan sebagainya. Hal demikian ternyata telah mengakibatkan terjadinya objektivisasi alam secara berlebihan, sehingga berakibat pula pada masalah terjadinya eksploitasi alam secara semena-mena yang pada ujungnya bermuara pada krisis ekologi.

*Kedua*, pandangan dunia modern yang bersifat objektivistis dan positivistis tersebut cenderung memposisikan manusia sebagai objek, dan masyarakat pun tak urung direkayasa bagaikan mesin, yang setiap saat bisa bertindak secara mekanik dan bukan atas dasar perilaku yang bersifat manusiawi.

*Ketiga*, pandangan modernisme memandang bahwa ilmu-ilmu positif-empiris adalah ilmu yang memiliki standar kebenaran tertinggi. Hal demikian dapat berakibat nilai-nilai moral-religius dalam masyarakat kehilangan kewibawaannya, dan akibat lanjutannya banyak anggota masyarakat yang mengalami disorientasi moral-religius yang pada gilirannya dapat mengakibatkan munculnya tindakan kekerasan, baik terhadap manusia itu sendiri maupun terhadap alam (lingkungan).

*Keempat*, pandangan modernisme juga telah mengakibatkan munculnya filsafat materialisme dalam kehidupan masyarakat. Artinya, ketika kenyataan mendasar tidak lagi ditemukan dalam sistem religi, maka materialah yang secara mudah dianggap sebagai kenyataan mendasar (materialisme ontologis). Sementara berdasarkan materialisme praksis (aksiologis) hidup pun menjadi keinginan yang tak habis-habisnya untuk memiliki dan mengontrol hal-hal yang bersifat material. Dalam kondisi demikian aturan main utama yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat adalah “*survival of the fittes*” dalam arti siapa yang memiliki kekuatan dalam mengontrol sumber-sumber daya material dialah yang bisa bertahan hidup, sementara, yang tidak memiliki kemampuan untuk itu harus rela tersingkirkan.

*Kelima*, konsekuensi yang ditimbulkan oleh paham modernisme ini adalah munculnya sikap militerisme dalam kehidupan masyarakat. Secara logika formal ketika norma-norma religius dan moralitas tidak lagi berdaya untuk mengendalikan perilaku masyarakat, maka norma-norma yang bersifat umum dan objektif pun cenderung hilang juga. Dalam kondisi demikian, sifat militerialisme atau sikap kekerasanlah satu-satunya cara untuk mengendalikan perilaku manusia dalam tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Keenam*, konsekuensi keenam atau yang terakhir dari munculnya paham modernisme itu adalah bangkitnya kembali apa yang disebut dengan istilah tribalisme, yakni mentalitas yang mengunggulkan suku bangsa atau kelompok sendiri. Jika dicermati secara lebih seksama, kondisi ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari hukum *survival of the fittes* dan penggunaan kekuasaan yang koersif.

Secara teoritis sistem religi sebenarnya telah berusaha untuk mengatasi tribalisme dan menggantikannya dengan universalisme, namun dalam praktiknya tidak memiliki cukup kekuatan dan otoritas, sehingga pengaruhnya tidak terasa. Lebih-lebih setelah berakhirnya perang ideology antara Amerika dan Unisoviet, yang oleh Huntington diintroduksi sebagai perang dingin babak kedua (Triguna, 2011 : 2), kini agama justru menjadi identitas penting yang cenderung mendukung kelompok-kelompok yang saling bertengkar atau dengan kata lain mendukung penguatan tribalisme dalam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari keenam pengaruh negatif atas munculnya paham modernisme, dan jika dikaitkan dengan sikap masyarakat Bali yang dengan mudah dapat mengadopsi berbagai pengaruh kebudayaan modern maka dapat dikembangkan sebuah pemahaman bahwa pada hakikatnya masyarakat Bali telah terkena pengaruh modernisasi dan globalisasi itu sendiri. Hal ini nampak dengan jelas dari orientasi masyarakat Bali yang selalu menjadikan kebudayaan Barat sebagai kiblat. Kekaguman orang Bali terhadap kebudayaan Barat mulai

tampak sejak awal abad ke-20, seiring dengan semakin intensifnya pengaruh kebudayaan Belanda atas kebudayaan Bali. Salah satu cara yang ditempuh Belanda untuk menanamkan pengaruh kebudayaannya atas kebudayaan Bali, adalah melalui penetrasi sistem pendidikan, yang menurut Van Niel, (1994) sistem pendidikan yang diterapkan Belanda tidak dapat dilepaskan dari politik pembaratan.

Dengan politik pembaratan tersebut, maka orang Bali sering memandang dunia Barat sebagai dunia yang modern, maju, rasional, dan berkembang dengan baik, sehingga harus diposisikan sebagai pusat, baik sebagai pusat orientasi maupun sebagai pusat teladan. Sementara dunia Timur selalu dipandang sebagai dunia yang tradisional, terbelakang, tidak berkembang, dan tidak baik. Dengan kondisi demikian, maka apa pun yang dilakukan dunia Barat harus diikuti, karena aspek modernitas, rasionlaitas, dan kebaikan selalu dianggap mengalir dari dunia Barat ke dunia Timur agar masyarakat Timur dapat sejajar dengan masyarakat Barat (Atmdja, 2001).

Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa orang Bali dengan mudah dapat menerima berbagai pengaruh kebudayaan Barat, termasuk mengadopsi barang-barang yang terbuat dari plastik.

Seperti dikatakan Gusti Biang Murka (52 Tahun) seorang ibu rumah tangga :

*“...tiang sampun sue ngangge prabotan sane melakar antuk plastik, santukan hargane murah tur yan pet ulung rikala ngangge ten belah. Siosan ring punika numbasne aluh nika santukan nyabran rahina wenten dagang meriki metanja mawinan akehan semetone deriki seneng ngangge prabotan sane melakar antuk plastik, di samping ngenahne lebih modern. (Saya sudah lama menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik, sebab selain harganya murah, dan jika jatuh saat dipakai tidak akan pecah. Selain itu, untuk memperoleh barangnya juga gampang, karena hampir setiap hari ada pedagang datang ke sini menjual barang-barang yang terbuat dari plastik, sehingga kebanyakan masyarakat di sini suka memakai prabotan yang terbuat dari plastik, selain penggunaannya praktis, kelihatannya juga lebih modern....”* (Wawancara, 25 Oktober 2014).



**Gambar 4.1 : Gusti Biang Murka saat diwawancarai, di rumahnya, di Kawasan Pura Besakih, Desa besakih, Kecamatan Rendang, Kab Karangasem. (Dok:Suda)**

Pernyataan Gusti Biang Murka (52 Tahun), sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Wilbert Moore yang mengatakan modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau pra modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi yang menyerupai kemajuan dunia Barat menunjukkan kebenarannya. Sebab hal yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan maju atau tidaknya suatu peradaban masyarakat, termasuk masyarakat Besakih adalah kebudayaan Barat. Ketika mereka telah mampu mengadopsi berbagai peralatan yang datang dari dunia Barat, mereka merasa hidupnya sudah sejajar dengan kehidupan orang Barat. Hal senada dikatakan Jero Sari (60 Tahun) :

*“...tiang ten inget ipidan kaden tiang mulai ngangge perabotan sane melakar antuk plastik. Napi mawinan santukan sampun sue pisan. Tiang ngangge perabotan sane melakar antuk plastik santukan mangkin sampun sulit pisan ngerereh prabotan sane melakar antuk kayu, kau, utawai daun. Nika mawinane akehan kramane mangkin ngangge prabotan sane melakar antuk plastik, menawi nika sane kebaos aab jagat. (Saya tidak ingat kapan mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari plastik, sebab sudah terlalu lama. Saya menggunakan peralatan yang terbuat dari plastik sebab sekarang sangat sulit untuk mendapatkan peralatan yang terbuat dari kayu, batok kelapa, dari daun dan yang lain selain plastik. Itu sebabnya kebanyakan masyarakat sekarang suka menggunakan peralatan yang terbuat dari plastik, mungkin ini karena factor jaman barangkali....”* (Wawancara, 25 Oktober 2014).



**Gambar 4.2 : Jero Sari salah satu informan saat diwawancarai di tempatnya berjualan, di Desa Besakih, Karangasem (Dok:Suda)**

Pernyataan Jero Sari tersebut mengindikasikan bahwa keinginan masyarakat Bali untuk mengadopsi kebudayaan Barat, telah terjadi sejak lama dan kini terus menguat. Hal ini menurut Atmdja (2010:10) disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: *Pertama* secara historis orang Bali melihat kebudayaan Barat telah berbentuk ilmu dan teknologi yang secara faktual lebih maju dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang Bali. *Kedua*, modernisasi dan globalisasi telah membuat orang-orang Bali dengan mudah dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. *Ketiga*, bersamaan dengan semakin kuatnya gerak modernisasi, maka cara berpikir modern yang oposisional dan dikotomis (*oposisi biner*) yang berlaku di dunia Barat juga ikut merambah kehidupan masyarakat Bali. Pola berpikir demikian semakin mendapat ruang dalam kebudayaan Bali, karena masyarakat Bali juga memiliki pola berpikir yang sama, yang dalam konteks Bali disebut *Rwa Bhineda*.

Ciri-ciri masyarakat modern seperti ini tampaknya tidak hanya merambah kehidupan masyarakat Besakih, yang sejak lama telah menjadi kawasan pariwisata di Bali, tetapi juga telah merambah kehidupan masyarakat Bali secara menyeluruh. Hal ini terbukti hampir seluruh masyarakat Bali, dalam kehidupannya sehari-hari telah terimbas oleh pemakaian berbagai barang hasil produksi industri negara-negara Barat, mulai dari berbagai jenis barang otomotif, elektronik, sampai perabotan rumah tangga, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan bahan-bahan dari plastik.

## **4.2 Gaya Hidup Konsumerisme**

Dengan mengacu pada Piliang (2004 : 179) dapat dipahami bahwa salah satu perubahan sosial yang menyertai kemajuan ekonomi dalam lima tahun terakhir di Indonesia adalah berkembangnya berbagai gaya hidup (*life style*), sebagai fungsi dari difrensiasi sosial yang tercipta dari adanya relasi konsumsi. Maksudnya, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia selama lima tahun terakhir ini lebih banyak diwarnai oleh perubahan gaya hidup masyarakat. Di dalam perubahan tersebut, konsumsi tidak lagi hanya dipandang sebagai upaya untuk memenuhi fungsi utilitas, atau kebutuhan dasar umat manusia, akan tetapi kini berkaitan pula dengan unsur-unsur simbolik untuk menandai kelas, status, atau simbol sosial tertentu.

Artinya, di era kekinian orang mengkonsumsi sesuatu tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga untuk mengekspresikan posisi sosial dan identitas kultural seseorang di dalam masyarakat. Dengan demikian, apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat dewasa ini, tidak lagi sekadar objek, tetapi juga makna-makna sosial yang



tersembunyi di balik tindakan konsumsi itu sendiri. Kecenderungan demikian oleh para pemikir sosial dan budaya Eropa, sering disebut dengan budaya konsumerisme, meskipun istilah yang sama digunakan di Amerika dengan pengertian yang sangat berbeda.

Sikap konsumerisme semacam ini tidak saja dialami oleh masyarakat Bali di daerah-daerah perkotaan, seperti Denpasar, Badung, Klungkung, Gianyar, dan Kota lainnya di Bali, tetapi telah merambah pula dalam kehidupan masyarakat di pelosok-pelosok pedesaan, termasuk masyarakat Desa Adat Besakih. Hal ini terlihat dari penampilan masyarakat Besakih, yang dari segi *performance* hampir tidak dapat dibedakan dengan penampilan orang kota pada umumnya, seperti tampak pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4.3 : Penampilan salah seorang masyarakat Besakih yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan pada umumnya. (Dok:Suda)**

Bukan hanya aspek penampilan yang sulit dibedakan antara masyarakat desa Besakih, dengan masyarakat perkotaan, melainkan juga dari segi praktik-praktik estetika kontemporer bagi masyarakat pedesaan juga telah ikut terpengaruh. Misalnya, dalam pemakaian berbagai asesoris, seperti hiasan rambut, cincin, giwang dan asesoris lainnya juga telah menyamai gaya hidup masyarakat perkotaan. Hal ini menurut Piliang (2004:180) dikarenakan dalam masyarakat konsumer telah terjadi perubahan mendasar berkaitan dengan cara objek-objek estetika itu dikonsumsi.

Hal ini bisa terjadi melalui penyebaran informasi mengenai gaya hidup yang secara efektif telah disebarluaskan oleh kaum kapitalis melalui tayangan iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Terkait dengan keberadaan TV sebagai media sosial, menurut Atmadja (2010:96) bahwa dalam konteks tertentu TV tidak hanya mengandung nilai hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sebagai media yang dapat

menertawakan, bahkan mengejek pemirsanya. Hal ini sejalan dengan gagasan Baudrillard (dalam Ibrahim, 2004:90) yang menegaskan bahwa TV bukan saja menjadi objek tontonan, tetapi pada saat yang sama TV juga bisa menonton kita. Misalnya, ketika kita menonton acara lucu/comedian di TV, kita bisa tertawa terpingkal-pingkal, namun sebaliknya ketika TV menyiarkan iklan atau acara lainnya yang bernuansa memamerkan berbagai model kehidupan mewah, sementara pemirsanya merasa belum memiliki apa yang ditayangkan oleh TV melalui iklan tersebut, maka giliran TV lah yang menertawakan kita.

Terkait dengan kepemilikan TV menurut Bapak Wayan Benya (44 tahun) yang juga Kepala Desa Besakih bahwa hampir di setiap keluarga memiliki minimal sebuah TV, sebagai alat hiburan. ‘‘Sekarang TV bukan lagi merupakan barang mewah, seperti halnya jaman dulu, karena selain untuk mendapatkan hiburan, TV juga telah menjadi semacam media sosial bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi, sehingga pengetahuan masyarakat bisa berkembang’’ tegas I Wayan Benya saat diwawancarai di sebuah warung kopi di desanya. Lebih lanjut menurut Wayan Benya, bahwa melalui siaran TV ini pula masyarakat banyak memperoleh informasi mengenai berbagai peralatan rumah tangga yang dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dan dengan cara yang sangat mudah. Mengapa demikian sebab sekarang selain informasinya telah menyebar melalui media televisi, masalah transportasi sekarang sudah tidak menjadi masalah bagi masyarakat-masyarakat di daerah pedesaan.

Oleh karenanya, untuk mendapatkan berbagai jenis perabotan, termasuk berbagai macam peralatan yang terbuat dari plastik bagi masyarakat kami di sini sudah tidak masalah. Sebab hampir setiap saat ada pedagang keliling yang datang ke sini untuk menjajakan berbagai barang kebutuhan masyarakat, termasuk berbagai peralatan itu tadi. Hal ini membuat masyarakat kami menjadi semakin pragmatis dalam mengadopsi berbagai peralatan modern, termasuk berbagai prabotan yang terbuat dari plastik. Namun, di sisi lain masyarakat kami sebagian besar tidak menyadari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh sampah plastik bagi lingkungan hidup ini. Selain itu menurutnya kesadaran masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Desa Besakih pada khususnya akan kesehatan lingkungan masih sangat rendah. Terkait dengan kondisi itu Wayan Benya (40 tahun) mencontohkan sebagai berikut.

‘‘...Suatu ketika pas saat itu ada *piodalan* di Pura Besakih, saya sedang berjalan kaki akan menuju ke Pura. Tiba-tiba dari arah depan datang sebuah truk membawa penumpang para pemedek yang baru saja selesai sembahyang. Tanpa saya sadari tiba-tiba salah seorang penumpang di atas truk itu membuang kulit jagung ke arah saya

dan pas mengenai kepala saya. Akhirnya, saya kembali pulang ke rumah mengganti destar yang saya pakai karena kotor terkena kulit jagung. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat kita akan kebersihan lingkungan masih sangat rendah...” (wawancara, 25 Oktober 2014).



**Gambar 4.4 : Kepala Desa Besakih saat diwawancarai di sebuah warung kopi di desanya (Dok:Suda)**

Fenomena yang disampaikan oleh Kepala Desa Besakih di atas, sesungguhnya sangat bertentangan dengan citra lingkungan masyarakat Bali. Menurut Atmadja (2010:400) citra lingkungan masyarakat Bali selain bersumberkan pada pengetahuan lokal, juga bersumberkan pada ajaran Agama Hindu, yang secara umum dapat dikatakan mengarah pada citra lingkungan ekosentrisme. Artinya, masyarakat Bali dalam memandang lingkungannya melihat bahwa antara manusia dan alam lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara konseptual sebenarnya masyarakat Bali menganut pandangan holistik dalam melihat hubungan manusia dengan lingkungannya. Namun, dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Bali telah terjerat pada gaya hidup konsumerisme sebagai ciri dari masyarakat modern. Terkait dengan gaya hidup konsumerisme Piliang (2004:306) menegaskan bahwa:

“Meningkatnya GNP perkapita di kawasan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam dekade terakhir ini, telah menciptakan satu tata masyarakat kelas menengah baru, yang dapat menentukan gaya hidupnya secara bebas sesuai dengan pilihannya tanpa perlu terikat oleh norma-norma sosial dan cultural yang ada. Mereka mengekspresikan gaya hidup melalui kepemilikan objek-objek dan simbol-simbol sosial. Mereka membeli makna sosial di tempat-tempat seperti Planet Hollywood atau Sogo. Mereka melihat gaya hidup seperti *fashion*, yang dapat dicoba, dipertahankan, atau ditinggalkan”.

Apa yang dikatakan Piliang di atas, dalam konteks Bali termasuk Desa Besakih telah menunjukkan kebenarannya. Hal ini terbukti kecenderungan umum ke arah pembentukan simbol-simbol sosial dan identitas kultural melalui gaya pakaian, mobil, atau produk industri lainnya, termasuk aneka barang yang terbuat dari plastik, sebagai komunikasi simbolik dan makna-makna sosial telah mewabahi masyarakat Besakih dalam dekade trakhir ini. Kondisi demikian didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat Desa Besakih karena berkembangnya sektor pariwisata di desa tersebut. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan masyarakat yang sebagian besar telah terbuat dari beton dan lantainya terbuat dari kramik atau marmer. Dalam budaya konsumen menurut Piliang (2004:307) bahwa:

“Konsumsi tidak lagi diartikan semata sebagai lalu lintas kebudayaan benda, akan tetapi telah menjadi panggung sosial, yang di dalamnya makna-makna sosial saling diperebutkan, dan di dalamnya pula terjadi perang posisi di antara anggota-anggota masyarakat yang terlibat. Budaya konsumerisme yang berkembang merupakan satu arena, di mana produk-produk konsumen merupakan satu medium untuk pembentukan personalitas, gaya, citra, gaya hidup, dan cara difreniasi status sosial yang berbeda-beda. Barang-barang konsumen, pada akhirnya menjadi sebuah cermin tempat para consumer menemukan makna kehidupannya”.

Kenyataan ini pula yang membuat masyarakat berlomba-lomba membeli berbagai produk industri modern karena bagi para konsumen dengan mengonsumsi barang-barang tersebut, mereka akan menemukan makna kehidupannya. Selain mereka berlomba-lomba membeli barang karena mereka ingin menemukan makna kehidupannya, mereka juga membeli beraneka barang, terutama yang terbuat dari plastik karena produk barang-barang yang datang belakangan selalu dikemas dalam bentuk dan kemasan yang diperbaharui, sehingga penampakkannya selalu lebih baik dan lebih modern. Namun, tanpa disadari menurut Kartanegara (dalam *Harian Kompas*, Senin, 23 Mei 2005) bahwa:

“Manusia modern menjadi semakin teralienasi dari alam. Hal ini terjadi setelah mereka menciptakan jurang yang tidak terjembatani antara keduanya, yakni manusia sebagai subyek dan alam sebagai obyek. Dengan memandang alam sebagai obyek nafsu, manusia modern dengan sains dan teknologinya mendominasi alam dan mengeksploitasinya secara kasar untuk memenuhi tuntutan mereka yang terus-menerus meningkat. Akibatnya, alam sekarang dalam proses kehilangan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ekologisnya”.

Berangkat dari pandangan Kartadinata di atas, dapat dibangun sebuah pemahaman baru bahwa masyarakat dewasa ini, telah terjat dalam kehidupan konsumerisme, sebagai turunan dari kehidupan modernisme, sehingga masyarakat, termasuk masyarakat Besakih begitu mudahnya mengadopsi berbagai barang produk industri termasuk beraneka barang yang terbuat dari plastik. Ketika mereka dengan mudah dapat mengadopsi berbagai prabotan yang terbuat dari plastik, sementara di sisi lain mereka tidak memahami bahwa plastik merupakan barang yang bersifat *undergradable* (sangat sulit terurai oleh alam), maka hal ini bukan tidak mungkin dapat menjadi mala petaka bagi kelestarian lingkungan ke depan.

Sebaliknya, jika sampah plastik dibakar ternyata sangat berbahaya, hal ini terungkap dari hasil penelitian di Jepang yang menunjukkan bahwa pembakaran sampah plastik yang dilakukan di sekitar pekarangan rumah berpotensi menyebabkan kemandulan pada wanita atau sulit melahirkan pada saat mengalami kehamilan (*Bali Post*, dalam Atmadja, 2005:317).

Hal-hal seperti ini tentu tidak banyak dipahami oleh masyarakat, termasuk masyarakat Besakih, sehingga ke depan proses pengadopsian barang-barang yang terbuat dari plastik dapat berakibat buruk bagi kelestarian lingkungan dan bagi kesehatan umat manusia pada umumnya. Dengan demikian perlu ada upaya yang lebih profesional dalam menanggulangi sampah khususnya sampah plastik, sebab setiap *piodalan* di Pura Besakih berton-ton sampah menumpuk di areal tersebut, yang sebagian adalah sampah plasti/kaleng yang jika dibuang ke tanah sangat sulit terurai oleh alam.

### **4.3 Barang Plastik, Praktis, dan Modern**

Menurut pandangan beberapa ahli, bahwa zaman ini bisa disebut zaman plastik, karena hampir sebagian besar peralatan yang digunakan oleh masyarakat saat ini, baik probotan rumah tangga maupun berbagai peralatan teknologi menggunakan bahan yang terbuat dari plastik atau mengandung unsur plastik. Selain pemanfaatannya praktis barang yang terbuat dari plastik, harganya juga terjangkau dan dari segi penampakan cukup modern. Oleh sebab itu, masyarakat Bali pada umumnya, dan masyarakat di Desa Besakih pada khususnya cenderung dapat menerima kehadiran barang-barang yang terbuat dari plastik, dan menggantikan berbagai perabotan rumah tangga yang dimiliki sebelumnya yang terbuat dari bahan non-plastik. Terkait penggunaan barang dari plastik Ni Nengah Murdani, seorang ibu rumah tangga (29 tahun) dari Desa Besakih mengatakan :

“...Saya lebih suka menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik, dibandingkan dengan menggunakan barang-barang yang terbuat dari besi, kramik, atau pun yang terbuat dari kayu. Karena barang yang terbuat dari bahan plastik membawanya ringan, mudah digunakan, dan dari segi penampilan juga cukup keren. Selain itu barang-barang yang terbuat dari plastik harganya terjangkau (relatif lebih murah) dibandingkan dengan yang terbuat dari kayu atau besi. Dengan demikian jauh lebih praktis jika menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan non-plastik....” (Wawancara, 28 Oktober 2014).

Ungkapan senada dikemukakan Ni Ketut Asih (26 tahun) yang juga seorang ibu rumah tangga :

“...Kalau saya di rumah lebih banyak memakai perabotan yang terbuat dari plastik, dibandingkan prabotan yang terbuat dari bahan non-plastik, sebab selain harganya murah, pemakaiannya juga sangat praktis. Di samping itu kalau jatuh saat memakai tidak mudah pecah (rusak), sehingga perawatannya juga lebih gampang. Jadi, pendeknya memakai prabotan yang terbuat dari plastik sangat praktis dan ekonomis....” (wawancara, 28 Oktober 2014).



**Gambar 4.5 : salah satu informan saat diwawancarai terkait kesenangannya menggunakan peralatan yang terbuat dari plastic (Dok:Suda)**

Berdasarkan kedua pendapat di atas, terungkap sebuah pemikiran bahwa masyarakat modern cenderung berpikir praktis dan ekonomis. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Atmadja (2010:437) bahwa plastik selain bisa ditransformasikan menjadi aneka barang yang tidak saja penampakannya indah, bahkan lebih indah dari aslinya, juga memiliki nilai kepraktisan yang sangat tinggi, sehingga cocok dengan tuntutan modernitas yang mendambakan pola kehidupan yang praktis dan ekonomis.

Namun, di balik keajaibannya itu, plastik juga dapat menjadi sumber sampah yang sangat potensial bagi kerusakan lingkungan alam, sebab bahaya dari sampah plastik itu tidak dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Ada beberapa alasan yang dapat memperkuat pandangan tersebut antara lain, (1) barang yang terbuat dari plastik mudah rusak dan sulit diperbaiki, sehingga harus segera disampahkan; (2) barang plastik yang dikeluarkan belakangan cenderung memiliki penampilan yang lebih baik, dan nilai keparkisannya juga lebih tinggi dibandingkan barang plastik yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga barang yang lama sering dipinggirkan dan otomatis menjadi sampah karena telah digantikan dengan barang yang baru yang lebih baik dari segi penampilan dan mempunyai nilai kepraktisan yang lebih tinggi; (3) sesuai dengan tuntutan masyarakat modern, banyak barang yang terbuat dari plastik hanya dibuat untuk satu kali pakai, lalu disampahkan, sehingga hal demikian dapat memperbanyak tumpukan sampah di sekeliling diri kita. Misalnya, tas kresek, botol aqua, botol yakul, dan berbagai macam mainan untuk anak-anak.

Demikian banyaknya barang-barang yang menggunakan bahan dasar plastik, yang diperjualbelikan di pasar dan hanya dibuat untuk satu kali pakai, maka dapat dibayangkan betapa dunia ini akan dipenuhi oleh sampah-sampah plastik yang secara teoritis bersifat *undergradable* (tidak bisa terurai oleh alam). Hal demikian tentu akan sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan hidup ke depan, sebab pencemaran oleh sampah plastik daya cemarannya terasa cukup lama, di samping adanya pencemaran sampah non-plastik yang juga sulit terurai oleh alam seperti kaleng bekas, pecahan botol, dan lain-lain. Sulitnya menanggulangi sampah plastik, yang disebabkan karena ketidaksadaran masyarakat akan bahaya dari sampah plastik di satu sisi, sementara di sisi lain masyarakat begitu gandrungnya memakai barang-barang yang terbuat dari plastik juga menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian ini dengan harapan temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh para pihak yang terkait langsung dengan aktivitas penanggulangan sampah, khususnya sampah plastik.

Kegandrungan masyarakat dewasa ini untuk menjadi orang modern, yang salah satu cirinya adalah suka memakai hasil-hasil industri yang menggunakan bahan dasar plastik, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari apa yang oleh Piliang (2004:109) disebut sebagai kebudayaan bujuk rayu. Terkait dengan kebudayaan bujuk rayu Piliang mengatakan :

“Kondisi kehidupan masyarakat konsumen dewasa ini adalah sebuah kondisi yang di dalamnya hampir seluruh energi dipusatkan bagi pelayanan hawa nafsu, yakni nafsu kebendaan, kekayaan, kekuasaan, seksual, ketenaran, popularitas, kecantikan, kebugaran, keindahan, dan kesenangan, sementara hanya menyisakan sedikit ruang

bagi penajaman hati, penumbuhan kebijaksanaan, peningkatan kesalehan, dan pencerahan spiritual. Di dalam kebudayaan yang dikuasai oleh hawa nafsu ketimbang kedalaman spiritual, maka sebuah kebudayaan tidak lebih dari sebuah revolusi dalam penghambaan diri bagi pelepasan hawa nafsu” (Piliang,2004:109).

Berangkat dari pandangan tersebut, dan jika dikaitkan dengan fenomena yang melanda masyarakat Bali secara umum dan masyarakat Desa Besakih pada khususnya, maka dapat dikembangkan sebuah pemahaman baru bahwa masyarakat Bali kini telah terimbas oleh arus modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dengan pola pikir oposisi biner (*binary opposition*) tidak saja memperkuat pengadopsian kebudayaan Barat, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan hidup tradisi itu sendiri.

Menurut Fakih (2005:43) banyak tradisi masyarakat yang diadaptasikan, dipinggirkan, dan dimarjinalkan karena tidak sesuai dengan tuntutan modernitas. Hal ini terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh pengetahuan dan teknologi Barat yang bersifat dominatif dan hegemonik, tetapi juga karena di dalam modernisasi tradisi dipahami sebagai bagian dari sesuatu yang harus ditransformasikan.

Itulah sebabnya banyak masyarakat dewasa ini, termasuk masyarakat Desa Besakih yang dengan mudah dapat mengadopsi berbagai barang yang terbuat dari plastik, seperti piring, sendok, gelas, dan termasuk berbagai peralatan upacara. Seperti yang dikatakan Ni Ketut Asih (26 tahun) bahwa dirinya lebih suka memakai peralatan yang terbuat dari plastik selain karena lebih praktis, pemakaiannya, juga memberikan kesan penampilan yang lebih modern. Mudahnya masyarakat Bali mengadopsi berbagai hal yang berbau modern, ternyata tidak hanya berhenti pada tataran pembelian barang-barang yang dianggap bernilai modern. Akan tetapi sikap demikian berimbas pula pada sistem sosial dan kelembagaan tradisional yang mereka miliki. Bahkan menurut asumsi penganut gagasan modernisasi revolusioner bahwa keterbelakangan negara-negara sedang berkembang sebenarnya bersumber dari sistem sosial dan kelembagaan tradisional yang mereka miliki oleh sebab itu, apa pun program yang dicanangkan guna mengatasi masalah dalam rangka mewujudkan modernisasi diperlukan reformasi total terhadap sistem sosial dan kelembagaannya (Desai, 1982 : 12).

Demikian hebatnya pengaruh modernisme terhadap kehidupan masyarakat Bali, dalam berbagai aspek kehidupannya, sehingga membuat berbagai nilai, norma, dan tatanan sosial kehidupan masyarakat juga ikut terpengaruh. Misalnya, pada jaman dahulu masyarakat Bali dengan ideology *Tri Hita Karananya* sangat berhati-hati untuk membuang sampah di sembarang tempat, namun kini masyarakat seenaknya berani membuang sampah tanpa peduli apakah itu sampah organik yang mudah diurai oleh alam ataukah sampah *unorganik* yang



tidak mudah diurai oleh alam, seperti misalnya sampah plastik. Padahal selain dampak ekologis yang ditimbulkan oleh plastik, yang acapkali diagung-agungkan oleh masyarakat sebagai simbol modernitas, ternyata plastik juga membawa dampak ekonomis bagi kehidupan masyarakat Bali.

Dikatakan demikian karena banyak hasil industri yang terbuat dari bahan plastik dapat menyaingi hasil-hasil kerajinan rumah tangga yang terbuat dari bahan non-plastik. Misalnya, bagi kebanyakan masyarakat Bali di zaman dulu banyak menggunakan perabotan rumah tangga yang dihasilkan oleh industri rumah tangga seperti, tempat air yang dalam bahasa lokal sering disebut *jeding* atau *gentong* yang terbuat dari tanah liat, kini diganti dengan ember yang terbuat dari plastik. Demikian pula, pot bunga, *celengan*, dan perabotan rumah tangga lainnya yang dulu dibuat dari bahan-bahan non-plastik yang cenderung dihasilkan oleh industri rumah tangga yang dimiliki oleh orang Bali sendiri, kini banyak diganti dengan prabotan yang terbuat dari plastik yang notebene pabriknya tidak dimiliki oleh orang Bali. Hal demikian tentu akan berdampak terhadap kelangsungan hidup industri rumah tangga masyarakat Bali, yang pada akhirnya berujung pula pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali secara umum.

Dari berbagai paparan di atas dapat dikembangkan sebuah pemikiran bahwa pemanfaatan barang-barang atau peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, tanpa pernah disadari oleh masyarakat pada umumnya, ternyata tidak hanya membawa petaka terhadap aspek ekologi manusia, tetapi membawa petaka pula bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Dikatakan demikian sebab industri rumah tangga yang dimiliki oleh orang Bali, yang cenderung menggunakan bahan-bahan non-plastik akan mendapat saingan ketika muncul berbagai produk industri yang menggunakan bahan dasar dari plastik.

Sebab selain harganya lebih murah, pemakaiannya juga lebih praktis dan penampakannya juga lebih bagus. Dengan demikian dapat pula dipahami bahwa betapa sesungguhnya dampak negatif dapat ditimbulkan oleh sampah plastik bagi kehidupan umat manusia, di muka bumi ini. Namun, karena keterjeratan manusia terhadap simbol-simbol identitas modernitas, maka apa pun dampak yang ditimbulkan cenderung diabaikan demi identitas modernitas itu sendiri.

#### **4.4 Masyarakat Bali Terjerat Ideologi *McDonaldisasi***

*McDonaldisasi* merupakan sebuah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh George Ritzer, pada tahun 1983 dalam esainya yang berjudul "*The McDonaldisation of Society*" (2002). Menurut Ritzer *McDonaldisasi* merupakan sebuah proses di mana berbagai

prinsip restoran *fast-food* hadir untuk mendominasi lebih banyak sektor kehidupan Amerika serta berbagai belahan dunia lainnya (Ritzer, 2002:2). Dalam konteks kajian ini peneliti menggunakan istilah *McDonaldisasi*, bukan dalam maksud untuk membahas *McDonald*, sebagai bisnis makanan cepat saji secara substantif. Melainkan untuk menggambarkan bahwa prinsip-prinsip restoran *fast-food* ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti masalah pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, politik, keluarga, dan lain-lain.

Terhadap perluasan pengaruh *McDonald*, Ray Croc sendiri yang mengilahi lahirnya restoran waralaba ini, tidak pernah membayangkan jika kreasinya itu akan berdampak sedasyat terhadap aspek kehidupan masyarakat dunia. Seperti telah disinggung dalam uraian di atas bahwa prinsip restoran waralaba *McDonald* ini telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hal demikian tentu akan berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Misalnya, salah satu aspek dehumanisasi yang ditimbulkan oleh prinsip restoran *fast-food* ini adalah minimnya kontak yang terjadi antar manusia, yang terkonfigurasi dalam bentuk hubungan antara pelayan *McDonald* dengan para pelanggannya. Betapa tidak, sebab hakikat dari restoran *fast-food* adalah menjadikan hubungan antara pegawai dan pelanggan berlalu dengan cepat. Jadi, antara pegawai dengan pelanggan sama-sama menginginkan waktu yang cepat, di mana si pelanggan ingin segera menyantap hidangan yang dipesannya, sedangkan si pegawai juga ingin segera menangani pesanan pelanggan berikutnya.

Kondisi demikian tampaknya tidak hanya berlaku di kalangan perusahaan waralaba *McDonald* dengan para pelanggannya, akan tetapi telah menyasar pula interaksi antar individu dalam kehidupan masyarakat Desa Besakih, sehingga tanpa disadari masyarakat dewasa ini, banyak yang menginginkan kehidupan yang serba instan (cepat saji). Misalnya, dalam hal pemakaian prabotan rumah tangga, banyak masyarakat yang menginginkan perabotan rumah tangga yang bisa digunakan secara praktis. Contoh, jika ingin bepergian ke suatu tempat dan membawa bawaan tertentu, mereka akan lebih memilih memakai tas plastik (*tas kresek*), dibandingkan tempat lainnya, sebab setelah selesai memakai, tas tersebut bisa dibuang dan tidak usah repot-repot lagi membawa pulang ke rumah.

Demikian pula saat makan, masyarakat lebih suka makan dengan sendok plastik dari pada menggunakan sendok yang terbuat dari stainless steel, sebab setelah makan, sendoknya bisa dibuang dan tidak usah lagi repot-repot mencuci atau membersihkan sendok tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat sekarang menyukai hal-hal yang memiliki nilai pragmatisme yang

tinggi. Seperti dikatakan Gusti Biang Gek (42 tahun) salah seorang ibu rumah tangga yang juga pegawai DKP Kabupaten Karangasem untuk Pura Besakih sebagai berikut:

“...Yan kadi tyang rikala mekarya, ngajeng, utawi mebebaktan, becikan nganggen perabot sane melakar antuk plastik, minakadi sendok, plastik, tas kresek tur sane tiosan, santukan uwusan ngangge iraga ten perlu malih repot ngumbahin utawi mersihin. Siosan ring punika, kramane mangkin sampun pada repot ring sajeroning pekaryan. Yan mangkin kayun ngambil kekaryan, makueh wenten kekaryan sane mabuat, mawinan kramane ritanjakan mekarya ngangge perabot lebihan memilih nganggon prabot sane praktis. (Menurut saya, saat melakukan sesuatu lebih baik memakai peralatan yang terbuat dari plastik, seperti saat makan memakai sendok plastik, saat bepergian membawa sesuatu memakai tas kresek, dan lain-lain, sebab setelah selesai memakai peralatan tersebut bisa dibuang dan kita tidak usah repot-repot lagi mencuci atau membersihkan peralatan tersebut. Selain itu, masyarakat sekarang sangat disibukan oleh pekerjaan yang menurut mereka lebih bermanfaat dari pada membersihkan peralatan seperti sendok, piring, dan lain-lain. Oleh sebab itu, masyarakat sekarang lebih suka menggunakan peralatan rumah tangga yang praktis, dan bila perlu sekali pakai langsung dibuang, karena banyak tuntutan pekerjaan lain yang harus dikerjakannya....” (Wawancara, 30 Oktober 2014).

Mencermati apa yang dikatakan Gusti Biang Gek (42 tahun) di atas, dapat dikembangkan sebuah pemahaman baru bahwa masyarakat Bali, termasuk masyarakat Desa Besakih dengan mudah bisa mengadopsi barang-barang yang terbuat dari plastik salah satunya disebabkan oleh prinsip *McDonaldisasi* telah menjerat kehidupan masyarakat, dan tidak terkecuali masyarakat desa Besakih itu sendiri. Hal ini terbukti, selain masyarakat gandrung menggunakan berbagai perabotan yang bernilai praktis dan ekonomis, dalam konteks pemanfaatan ruang dan waktu masyarakat juga tampak telah terpengaruh oleh prinsip *McDonaldisasi* yang diilhami oleh perusahaan wara laba *McDonald* tersebut. Seperti dikatakan I Gusti Lanang Teges (53 tahun) Mandor Kebersihan DKP Kabupaten Karangasem untuk Pura Besakih, ketika ditanya apakah dirinya dalam proses menjalankan pekerjaannya memilah antara sampah plastik (sampah *un-organik*) dengan sampah non-plastik (sampah organik) diantara pernyataanya dia berucap :

“...Ya kalau ada waktu saya pisahkan sampah yang berasal dari plastik dengan sampah yang bukan plastik. Ini saya lakukan karena, kadang-kadang tenaga yang saya miliki kualahan melakukan pemilahan, terutama saat *upacara piodalan* berlangsung. Mengapa demikian sebab, sampai saat ini saya hanya punya tenaga sebanyak 62 orang yang terdiri atas 37 orang dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dan 25 orang dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali. Sedangkan pada saat *piodalan* berlangsung sampah yang harus ditangani setiap

harinya mencapai satu ton lebih, sehingga tenaga saya kualahan untuk memilah sampah yang berasal dari plastik atau non-plastik....”.

Lebih lanjut menurut Gusti Lanang Teges :

“...saking banyaknya sampah yang harus dikelola saat *upacara piodalan* di Pura terbesar di Bali ini, maka saya langsung saja perintahkan anak buah saya untuk membuang sampah itu ke tukad mati (*pangkung*) yang berada persis di sebelah Barat, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni tepatnya di Banjar Palak, kira-kira 800 meter sebelah Tenggara Pura Besakih....” (Wawancara, 30 Oktober 2014). Seperti tampak pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4.6 : Mandor mandor kebersihan DKP Kabupaten Karangasem untuk Pura Besakih (Dok:Suda)**



**Gambar 4.7 : Pangkung tempat pembuangan sampah bekas-bekas upacara piodalan di Br Palak, Karangasem. (Dok:Suda)**

Pernyataan Gusti Lanang Teges tersebut, selain dapat dimaknai bahwa masyarakat saat ini sudah sangat pragmatis, juga membuktikan bahwa citra lingkungan masyarakat Bali tidak lagi bersumberkan pada pengetahuan lokal dan ajaran Agama Hindu yang cenderung mengarah pada etika *ekosentrisme*, yakni mereka melihat manusia dan alam merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Citra lingkungan menurut Soemarwoto (1989:94) adalah anggapan orang tentang struktur lingkungan, dalam arti bagaimana lingkungan itu berfungsi, bagaimana reaksinya terhadap tindakan orang serta hubungan manusia dengan lingkungannya.

Berangkat dari pandangan Soemarwoto di atas dan jika dikaitkan dengan citra lingkungan masyarakat Bali dapat diketahui bahwa citra lingkungan masyarakat Bali, yang bersumberkan pengetahuan lokal berupa ideology *Tri Hita Karana*, yang menekankan hubungan harmonisasi antara manusia dengan sesama manusia (unsur *Pawongan*) harmonisasi hubungan antara manusia dengan lingkungannya (unsur *Palemahan*) dan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhannya (unsur *Parhyangan*) tampaknya kini telah mulai bergeser ke citra lingkungan yang lebih mengandalkan etika *antroposentrisme*. Artinya, masyarakat dalam memandang lingkungannya, tidak saja mengambil jarak dengan lingkungan alamnya, tetapi juga menganggap dirinya sebagai pusat dari segala-galanya (Kraf, 2002).

Terhadap kondisi ini, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi pemuda pelajar, *sekaa teruna*, warga banjar, para guru, dan pekerja lingkungan, pada hari Jumat, 23 Oktober 2014 telah berkumpul di *Pasraman* Besakih, untuk berdialog mengenai bahaya sampah plastik yang tercecer di sekitar Pura Besakih. Usai diskusi sebagai bentuk tekad bersama untuk mengisi momen Sumpah Pemuda tahun ini (baca: tahun 2014), para pemuda Besakih melakukan ‘‘Deklarasi Pemuda Peduli Sampah Plastik’’, yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan untuk menjadikan kawasan Besakih sebagai tempat suci yang bebas dari sampah plastik.

Selain deklarasi pemuda peduli sampah plastik, yang dihasilkan dari dialog soal bahaya sampah plastik dan masalah sampah plastik di sekitar kawasan Besakih, dialog itu juga menghasilkan simpulan bahwa terhadap masyarakat Bali perlu dilakukan revolusi mental, terutama terkait dengan kepedulian masyarakat terhadap sampah plastik. Menurut hasil dialog tersebut hal demikian dapat dilakukan dengan gerakan nyata, baik dalam hal membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan maupun revolusi mental dalam konteks mengubah kebiasaan buruk masyarakat dalam hal membuang sampah sembarangan. Simpulan lain yang dirumuskan dari dialog tersebut adalah perlu adanya manajemen pengelolaan kebersihan dan manajemen pengelolaan sampah yang jelas dari Pemkab Karangasem untuk Pura Besakih (*Bali Post*, 26 Oktober 2014).

Apa yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di *Pasraman* Besakih, membuktikan bahwa masyarakat Bali, saat ini sudah sangat pragmatis dan kurang menyadari

akan bahaya dari sikap membuang sampah sembarangan khususnya sampah plastik. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa citra lingkungan masyarakat Bali yang semula berorientasi pada etika *ekosentrisme*, kini telah bergeser ke etika lingkungan *antroposentrisme*. Hal ini menurut Chang (2000) bisa dikatakan bahwa modernisasi dapat mengakibatkan sistem pemikiran ekologis berubah menjadi sistem filsafat utilitarianisme dan pragmatisme. Akibatnya, manusia selalu berusaha mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan tanpa memperhatikan dampak negatif yang timbul dari usahanya tersebut.

## **BAB V**

### **POLA PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK PADA UPACARA *PIODALAN* DI PURA BESAKIH**

#### **5.1 Karakteristik Organisasi dan Teknologi Penanggulangan Sampah di Pura Besakih**

Untuk memahami pola penanggulangan sampah pada *upacara piodalan* di Pura Besakih, kita tidak bisa melepaskan diri dari karakteristik organisasi induk yang menangani persoalan sampah itu sendiri, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali. Berbicara masalah karakteristik organisasi dapat mengacu pada dua hal pokok, yakni struktur dan teknologi organisasi. Struktur organisasi meliputi bagaimana pembagian tugas pengelolaan sampah di wilayah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, khususnya untuk di Pura Besakih.

Sedangkan berbicara soal teknologi adalah menyangkut mekanisme atau teknik yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dalam upaya pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan berdaya guna, baik terhadap lingkungan maupun terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di mana sampah itu dikelola. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka karakteristik organisasi penanggulangan sampah terkait dengan *piodalan* di Pura Besakih dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **A. Struktur Organisasi**

Dengan mengacu pada perspektif fungsional struktural, maka dapat dikatakan bahwa struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan pula bagaimana tiap-tiap bagian dalam struktur itu menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam konteks struktur organisasi ini peneliti juga mengkaji bagaimana struktur organisasi itu menunjukkan spesialisasi pekerjaannya, dan bagaimana saluran perintah itu dijalankan sehingga mekanisme kerja dapat berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Berangkat dari pandangan tersebut, dan jika meminjam gagasan Comte dan Spencer (dalam Simandjuntak, 1985:70) yang menyatakan bahwa masyarakat manusia seperti suatu organisme yang hidup.

Terkait dengan gagasan tersebut maka kajian ini akan lebih diarahkan pada fungsi masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi itu sendiri. Atau dengan bahasa

lain dapat dikatakan bahwa tanpa struktur organisasi dan manajemen yang tepat, maka sangat mustahil organisasi tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, bahkan dengan bahasa yang lebih ekstrem dapat dikatakan organisasi tersebut bisa bubar, jika masing-masing bagian yang ada tidak berfungsi.

Jika mengacu pada permasalahan tersebut, dan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan struktur organisasi dan pembagian tugas pengelolaan sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, khususnya untuk di Pura Besakih, maka peneliti melakukan wawancara dengan Mandor Kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, untuk Pura Besakih yakni Bapak I Gusti Lanang Teges di antara berbagai pernyataannya dia berucap:

“...Mengenai pembagian tugas pengelolaan sampah, khususnya untuk di kawasan Pura Besakih, memang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Bab II pasal 3 Perda Kabupaten Karangasem No. 20/2012 tentang Pengelolaan Sampah, telah ditegaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi....”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, yang merupakan sebuah organisasi pemerintah kabupaten, meskipun tidak mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sampah di Pura Besakih, tetapi secara implisit pada ketentuan pasal 3 Perda No.20 tahun 2012 telah terkandung makna bahwa pengelolaan sampah harus di dasarkan atas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Jadi, siapa pun yang ditugaskan untuk menangani pengelolaan sampah di kawasan Pura Besakih harus mentaati asas tersebut, yakni harus melakukan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, berkelanjutan, memperoleh manfaat, keadilan dan seterusnya. Kendati demikian, menurut Gusti Lanang Teges bahwa:

“... Memang pada hari-hari biasa, dalam arti tidak ada upacara *piodalan*, persoalan tata kelola kebersihan di kawasan Pura Besakih ini tidak ada persoalan. Akan tetapi pada saat upacara-upacara besar, seperti upacara *Panca Bali Krama, Ida Betara Turun Kabeh*, dan upacara besar lainnya, sampah yang dikelola setiap harinya diperkirakan mencapai satu ton lebih. Dengan jumlah tenaga kerja yang hanya terdiri atas 62 orang untuk menangani sampah sebegitu banyaknya saya sering kualahan. Terutama di areal-areal parkir, sebab belum sempat membersihkan sampah yang kadang-kadang dibuang sembarangan oleh sebagian *pemedek*, tiba-tiba datang lagi



*pemedek* baru parkir di tempat yang sama, sehingga akhirnya sampah di areal parkir, menumpuk dan tidak tertangani secara baik. Tetapi untuk di areal *madya* dan *utamaning mandala Pura*, kita masih bisa atasi, sebab selain banyak *pemedek* yang *mekemit* (menginap) secara sukarela *ngaturang ayah* (membantu nyapu) halaman pura, para *pengenter* persembahyangan juga sering mengimbau agar para *pemedek* setelah selesai mengikuti persembahyangan, membuang sisa sarana persembahyangannya ke tempat-tempat sampah yang telah disediakan....” (Wawancara, 1 Nopember 2014).

Berdasarkan penuturan mandor kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Karangasem untuk Pura Besakih ini, dapat dijelaskan bahwa secara struktur organisasi dan pembagian tugas serta manajemen kerja pada setiap unit kerja yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem memang telah tertata dengan baik. Akan tetapi persoalan yang kemudian muncul, terkait dengan pengelolaan sampah khususnya di kawasan Pura Besakih adalah pada setiap pelaksanaan upacara *piodalan*, di mana volume sampah sering tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Misalnya, saat *piodalan* berlangsung *Ida Bhatara* bisa *nyejer* sampai 30 hari, sedangkan sampah yang muncul setiap harinya tidak kurang dari satu ton, sementara tenaga yang tersedia untuk menangani sampah tersebut hanya 62 orang. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi proses pengelolaan sampah itu sendiri, karena sampah yang ada setiap harinya terlalu banyak.

Terkait dengan tata kelola sampah di kawasan Pura Besakih, I Nengah Simpen (29 tahun) salah seorang pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem untuk Pura Besakih menuturkan:

“...Kelihatannya memang gampang bekerja di sektor pengelolaan sampah, yakni tinggal angkut dan kumpulkan di tempat pembuangan akhir (TPA) selesai urusan. Tetapi persoalan di lapangan tidak semudah yang diomongkan orang. Menangani sampah harus serius tidak boleh main-main, sebab jika tidak akan muncul masalah baru. Misalnya, jika sampah hanya ditumpuk begitu saja di TPA, maka hal itu bisa mendatangkan wabah penyakit bagi masyarakat di sekitarnya, dan juga bisa menimbulkan bau tak sedap sehingga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya....” (Wawancara 1 Nopember 2014).

Apa yang dikatakan I Nengah Simpen sejalan dengan pandangan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mengatakan bahwa urusan pengelolaan sampah di TPA bukanlah pekerjaan ringan. Menurutnya, urusan pengelolaan sampah di TPA sangat vital, bahkan lebih rumit dan kritis dari mengurus persoalan transportasi. Oleh karenanya, Risma demikian

panggilan akrab Wali Kota perempuan pertama di lingkungan Pemkot Surabaya ini, dalam hal pengelolaan sampah di TPA Benowo, Surabaya pihaknya menggandeng sebuah tim. Tim yang dibuatnya terdiri atas beberapa elemen, seperti dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (Bappenas) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dan dari kalangan akademisi, pakar ekonomi dan Hukum. Tugas tim ini adalah mengurus persoalan teknis seperti, penentuan harga pengelolaan, penentuan pemenang tender dan persoalan teknis lainnya.

Hal senada dikatakan pula oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya Chalid Buchari, bahwa untuk kesehariannya pengelolaan sampah di Kota Surabaya dilakukan dengan cara mengendalikan kenaikan volume sampah. Adapun cara yang ditempuh oleh Buchari adalah dengan cara menggalakkan pembuatan rumah kompos di setiap kawasan, yang sampai saat ini pihaknya telah mempunyai 18 rumah kompos. Selain pembuatan rumah kompos Pemkot Surabaya juga focus pada pengelolaan sampah terpadu dan memberdayakan masyarakat melalui program *green and clean* yang diadakan setiap tahun dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan (*Bali Post*, 11—17 November 2013:10).

## **B. Teknologi Organisasi**

Dalam konteks ini, yang dimaksud teknologi organisasi adalah mekanisme atau teknik yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dalam rangka pengelolaan sampah khususnya untuk di Kawasan Pura Besakih. Penanggulangan sampah di Kawasan Pura Besakih seharusnya menggunakan mekanisme/teknik konversi untuk menjadikan sampah menjadi bahan yang lebih berguna secara ekonomis dengan dampak lingkungan yang minimal di tempat pembuangan akhir (TPA). Akan tetapi pada kenyataannya mekanisme konversi sampah sebagaimana diharapkan belum bisa dilaksanakan, karena keterbatasan peralatan teknologi pengolahan sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem. Berikut wawancara peneliti dengan Mandor Kebersihan untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem di kawasan Pura Besakih.

Bapak I Gusti Lanang Teges selaku Mandor Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Besakih menuturkan:

“...Sampai saat ini, pengelolaan sampah di kawasan Pura Besakih hanya segini-segini saja. Belum ada pengelolaan yang dapat mengkonversi sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna secara ekonomis. Jadi sampah yang begitu banyak dibuang begitu saja ke *pangkung* atau *tukad mati*. Kalau toh kami diberikan mesin pengolahan sampah, mesinnya kecil dan tidak didukung dengan peralatan yang lain seperti air, maka kami mengalami kesulitan dalam mengoperasikan mesin tersebut. Sebab sampah yang pada saat *piodalan* kebanyakan berasal dari daun kelapa (*janur*), daun henau (*ron*) dan dari daun lontar yang proses penghancurannya memerlukan air yang cukup. Jadi kalau pas lagi *odalan* di Pura Besakih mesin yang ada tidak mampu mengolah sampah yang begitu banyaknya, lebih-lebih sampah yang berasal dari daun-daun itu tadi, selain sifat sampahnya keras jumlahnya juga terlalu banyak, yakni lebih dari satu ton setiap harinya sementara *piodalannya* berlangsung sampai 30 hari....” (Wawancara, 31 Oktober 2014).



**Gambar 5.1 : Mesin pengolahan sampah di TPA Besakih  
(Dok: Suda)**

Jika mengacu pada apa yang dikatakan Bapak I Gusti Lanang Teges dapat dikatakan bahwa sampai saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dalam proses penanggulangan sampah masih bersifat sangat manual, dalam arti hanya membuang sampah begitu saja ke *tukad mati*, yang terletak persis di sebelah Barat TPA di Banjar Palak, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Hal ini tentu berdampak tidak baik terhadap lingkungan, yakni dapat menimbulkan wabah penyakit dan bau tak sedap.

Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makasar. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makasar dalam rangka pengolahan sampah telah menggunakan apa yang disebut sistem *landfill* atau tanah urug dengan bekerja sama dengan dua investor asing, yang berasal dari Australia dan Jepang. Investor yang berasal dari Australia (PT *Organik Recovery Group*) ini mengelola sampah menjadi pupuk

kompos, sedangkan investor yang berasal dari Jepang (PT *Gikoko Kogyo* mengolah sampah di TPA menjadi gas metan yang menghasilkan energi listrik, namun baru bisa melayani di sekitar TPA saja.

Mengenai organisasi kerja, secara organisatoris proses penanggulangan sampah di kawasan Pura Besakih dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni di wilayah sebelah Barat Pura ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 25 orang, sedangkan di wilayah bagian Timur Pura ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 37 orang. Mengenai status kepegawaian dari semua tenaga kerja yang bertugas di bidang kebersihan, baik yang bertugas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem maupun di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali, masih berstatus pegawai kontrak, dengan gaji per orang per hari hanya Rp 22.000, kecuali Mandor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem untuk Pura Besakih sudah berstatus PNS dengan gaji Rp 1.500.000/bulan.

Terkait dengan mekanisme kerja Bapak I Ketut Suri (40 tahun) mandor kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali, menyatakan bahwa :

“...dalam mekanisme kerja saya diberikan satu unit truk engkel dan satu unit ambrol (kontener) tapi kondisinya sudah rusak. Sebenarnya saya membutuhkan satu truk mini untuk keliling mengangkut sampah di jalan-jalan seputaran Desa Besakih ini dan hal itu sudah saya usulkan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Dengan demikian saya tidak bisa bekerja maksimal, tanpa dukungan peralatan yang memadai....” (Wawancara, 31 Oktober 2014).

Pengakuan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Mandor kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem untuk Pura Besakih Bapak I Gusti Lanang Teges dengan mengatakan sebagai berikut.

“...Kalau saya yang menangani sampah di bagian Timur kawasan Pura Besakih malah tidak dikasi alat transport angkutan. Jadi, sehari-harinya saya bersama staf saya membawa sampah ke TPA dengan cara memikul yang jaraknya kurang lebih 800 meter. Tapi karena ini sudah menjadi tugas saya, ya mau bilang apa lagi saya lakoni aja ....” (wawancara, 31 Oktober 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan tadi dapat diketahui bahwa selama ini proses pengelolaan sampah di TPA Besakih masih belum dilengkapai dengan peralatan yang memadai dan belum ada upaya, baik dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Karangasem maupun dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali untuk mengolah sampah menjadi barang yang lebih memiliki nilai guna secara ekonomis, misalnya menggunakan teknologi yang disebut sistem *landfill* serta belum ada upaya mengundang investor asing untuk bekerja sama dalam rangka pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat secara ekonomis.

Terkait dengan proses pengolahan sampah plastik, kadang-kadang sudah dilakukan pemilahan dengan sampah organik, tetapi pada hari-hari tertentu, misalnya pada saat *piodalan* berlangsung, pemilahan sulit dilakukan mengingat jumlah sampah yang berton-ton. Seperti yang dikatakan Bapak I Gusti Lanang Teges (53 tahun) sebagai berikut.

“...Kadang-kadang saya melakukan pemilahan sampah plastik dengan sampah non-plastik. Hal ini bisa saya lakukan ketika jumlah sampah tidak terlalu banyak. Tetapi kalau sampah terlalu banyak, seperti pada saat-saat *piodalan* dengan jumlah sampah yang mencapai 1 ton lebih setiap harinya, dengan jumlah tenaga yang hanya 37 orang saya kualahan. Kalau hari-hari biasa saya bisa melakukan pemilahan antara sampah plastik dengan sampah non-plastik, tetapi pada hari-hari *piodalan* saya buang saja semua sampah bekas-bekas upacara ke pangkung (tukad mati) yang ada disebelah Barat TPA, Br Palak, Desa Besakih, Kecamatan rending Kabupaten Karangasem....” (wawancara, 31 Oktober 2014).

Apa yang dikatakan oleh Bapak I Gusti Lanang Teges memang benar adanya seperti tampak pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.1 : sampah plastic yang telah dipisahkan dengan sampah non-plastik (Dok. Suda)**



**Gambar 5.2 : hasil pemilahan sampah non-plastik  
(Dok:Suda)**

Berdasarkan ke dua gambar di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di kawasan Pura Besakih memang telah dilakukan pemilahan antara sampah yang berasal dari plastik dengan sampah non-plastik. Akan tetapi proses pengolahan lebih lanjut belum nampak dilakukan. Misalnya, sampah plastik didaur ulang menjadi barang jadi yang memiliki nilai ekonomi tinggi misalnya. Sementara sampah non-plastik sudah diolah menjadi pupuk kompos, tapi hasilnya baru mencukupi untuk memupuk pepohonan di areal pertamanan pura Besakih saja. Jadi hasil dari pengolahan sampah non-plastik di TPA Besakih boleh dibilang belum memiliki nilai manfaat yang baik dilihat dari sudut pandang ekonomi.

### **C. Karakteristik Pekerja**

Berbicara persoalan karakteristik para pekerja, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai profil pekerja itu sendiri. Dalam organisasi pada umumnya, pekerja merupakan sumber daya manusia yang mempunyai fungsi strategis bagi kehidupan organisasi bersangkutan. Dalam organisasi penanggulangan sampah, khususnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, dan lebih khusus lagi para pekerja yang menangani masalah sampah di kawasan Pura Besakih, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikannya hanya tamatan SMP ke bawah. Padahal pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sampah, yang nota bena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai persampahan.

Terkait dengan hal tersebut, sikap dan perilaku pekerja dalam jangka panjang dapat memperlancar atau sebaliknya merintanginya tercapainya tujuan organisasi. Artinya, jika para

pekerja dalam organisasi bersangkutan mempunyai sikap profesionalisme kerja yang baik, komitmen yang baik, dan disiplin kerja yang baik, maka para pekerja dalam konteks ini dapat dikatakan memperlancar pencapaian tujuan organisasi.

Sebaliknya, jika pekerja dalam organisasi bersangkutan tidak mempunyai profesionalisme kerja yang baik, tidak memiliki komitmen yang baik dan tidak disiplin dalam menjalankan pekerjaannya, maka pekerja model ini dapat dikatakan merintangi pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerja merupakan modal utama dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Atau dengan bahasa lain dapat dikatakan walaupun teknologi yang digunakan adalah teknologi canggih dan didukung oleh struktur yang baik, namun jika pekerjaanya kurang profesional, maka semua itu tidak akan berarti apa-apa.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Peter F. Drucker (dalam Nugroho, 2008:106) bahwa peradaban umat manusia hari ini (dan ke depan) bukan lagi peradaban kapitalis atau sosialis, namun peradaban pengetahuan, karena pengetahuan menjadi landasan utama manusia dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambahnya. Dikatakan Drucker bahwa:

*“Value is now created by ‘productivity’ and ‘innovation’ both applications of knowledge to work...knowledge is the only meaningful resource to day. The traditional factors of production ...have not disappeared. But they are become secondary. They can be obtained, and obligated easily, provided there is knowledge. And knowledge in this new meaning is knowledge as means to obtain social and economic results”*

Berangkat dari pandangan Drucker di atas, dapat diketahui bahwa pada hari ini dan pada masa yang akan datang paham yang berkembang dalam kehidupan masyarakat bukan lagi paham kapitalisme atau paham sosialisme melainkan peradaban masyarakat yang berbasiskan atas pengetahuan. Masyarakat berbasiskan pengetahuan adalah masyarakat di mana para warganya mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan yang setara, sehingga antara warga yang satu dengan warga yang lain merasa setara (*equal*). Dengan kondisi demikian, maka persoalan demokrasi, HAM, transparansi, dan kesetaraan *gender*, dan kesamaan kedudukan di depan hukum bukanlah sesuatu yang unik, atau sesuatu yang luar biasa.

Meskipun apa yang dikatakan Drucker di atas tidak dapat diberlakukan sepenuhnya di tempat penelitian ini, paling tidak tingkat pendidikan pekerjaanya rata-rata rendah, namun

dari segi kesetaraan mereka merasa cukup *equal*. Dengan kondisi demikian apa yang dikatakan oleh sang mandor, karena sang mandor dianggap memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan lebih tinggi dalam hal pengelolaan sampah dari pada pegawainya, maka apapun yang dikatakan oleh sang mandor cenderung diikuti oleh para pekerjanya. Hal ini tentu juga terkait dengan persoalan karakteristik pekerja itu sendiri.

Beberapa hasil kajian mengenai karakteristik pekerja, khususnya mengenai perilaku pekerja/personil kebersihan dalam mengumpulkan dan mengangkut sampah ke TPA di Br. Palak, Desa Besakih adalah seperti di bawah ini. Menurut penuturan beberapa informan yang berasal dari masyarakat yang bermukim di sekitar TPA Br. Palak, Desa Besakih adalah sebagai berikut. Menurut Bapak Komang Astawa (32 tahun) :

“... Apa yang dilakukan oleh para pekerja kebersihan di lingkungan Pura Besakih, sudah sesuai prosedur. Cuman pada saat *piodalan* di Pura Besakih mereka kualahan, sehingga banyak sampah terutama di areal parkir yang menumpuk. Kasihan juga melihat para pekerja yang hanya 62 orang harus membersihkan sampah berton-ton jumlahnya ketika hari *piodalan* itu berlangsung...” (wawancara, 31 Oktober 2014).

Selanjutnya menurut Bapak Komang Kariasa (30 tahun) :

“...Sebenarnya sikap/perilaku para pekerja pengolahan sampah di kawasan Pura Besakih itu, boleh dibilang cukup penyabar. Meskipun begitu banyaknya sampah yang harus diangkut, terutama saat *piodalan*, namun mereka tidak pernah kelihatan marah-marah, mungkin mereka sudah menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab mereka...” (Wawancara, 31 Oktober 2014).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa profesionalisme kerja bagi para pekerja di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem khususnya untuk kawasan Pura Besakih dapat dibilang cukup profesional, dalam konteks memberi pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal membersihkan lingkungan dan mengangkut sampah ke TPA. Kenyataan ini diperkuat dengan tidak adanya keluhan masyarakat terkait dengan keberadaan sampah di lingkungan Pura Besakih, meskipun kadang-kadang keberadaan sampah sampai berton-ton. Namun, proses pengolahan sampah di TPA yang masih bersifat sangat manual, dalam arti belum diolah secara mekanik menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut penuturan Mandor kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali Bapak I Ketut Suri (40 tahun) :



“...Meskipun tenaga kerja kami tingkat pendidikannya relatif rendah ditambah dengan tingkat kesejahteraannya juga rendah, yakni upah para pekerja yang hanya Rp 750.000/bulan, tetapi kami tetap berusaha melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, meskipun ada beberapa kritik dari masyarakat itu sifatnya kritik membangun, yakni demi perbaikan kinerja kami ke depan. Akan tetapi, kami baru bisa memberi pelayanan sampai pada tingkat mengumpulkan dan mengangkut sampah ke TPA, setelah sampai di TPA langsung di buang ke *tukad mati* yang ada persis di sebelah barat TPA Br Palak, Besakih sementara pengolahan lebih lanjut belum bisa kami lakukan karena terbatasnya dana dan peralatan yang disediakan oleh pihak pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, baik DKP Kabupaten Karangasem maupun DKP Provinsi Bali...” (wawancara,31 Oktober 2014).

Apa yang dikatakan Mandor sampah untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali ini, menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pihak petugas dalam hal pengangkutan sampah ke TPA sudah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi baru sebatas mengumpulkan dan mengangkutnya ke TPA, sementara bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan sampah sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi belum tersentuh sama sekali. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana dan tingkat pendidikan mereka yang masih relatif rendah sehingga tidak terpikirkan hal-hal yang bersifat inovatif dalam hal pengolahan sampah. Menurut Bapak I Gusti Lanang Teges (53 tahun) :

“...dari segi status pekerja, semua pekerja yang bekerja di lingkungan kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi untuk kawasan Pura Besakih berstatus *full time*. Dengan jumlah jam kerja selama 8 jam setiap hari, itu untuk hari-hari biasa, sedangkan pada saat *piodalan* jam kerja bisa dari jam 7.00 Wita sampai jam 19.00 Wita dengan perhitungannya lembur dan dibayar Rp 15.000 per hari selama *piodalan* berlangsung. Selain itu, selama *piodalan* berlangsung para pekerja juga dikasi *pica* dalam bentuk makanan yang disiapkan oleh pihak panitia *piodalan*. Jadi, sampai penelitian ini dilakukan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Karangasem untuk kawasan Pura Besakih sebanyak 37 orang termasuk mandor dan oleh dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali, sebanyak 25 orang, termasuk satu orang sopir dan satu orang mandor...” (Wawancara, 31 Oktober 2014).

Sementara menurut Bapak I Ketut Suri (40 tahun) mandor kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali untuk Kawasan Pura Besakih :

“...Saya harus bisa kerja rangkap, meskipun secara struktural posisi saya adalah mandor yang secara fungsional sebenarnya hanya bertugas mengawasi para pekerja, tetapi karena jumlah pekerja yang sangat terbatas, sekali-sekali ketika sampah

membeludak saya juga ikut ngangkut sampah dan membawanya ke mobil angkutan sampah. Demikian halnya jika sopir saya sakit, mau tidak mau suka tidak suka saya juga harus mengambil pekerjaan jadi sopir. Jadi dalam hal pengelolaan sampah di kawasan Pura Besakih ini belum ada segmentasi kerja yang ketat, dalam arti pembagian tugas yang ketat, sebab semuanya tergantung dari kondisi lapangan...” (wawancara, 31 Oktober 2014).

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, maka secara spesifik dalam analisis ditemukan bahwa masih ada kesenjangan antara *top leader* yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dengan pelaksana di lapangan. Kesenjangan tersebut mencakup :

- (1) Kesenjangan kemampuan intelektual yang bersifat teknis, dalam bentuk kemampuan menyerap fakta-fakta kebutuhan-kebutuhan, tantangan-tantangan dan selanjutnya untuk dianalisis diolah dan dirumuskan dalam suatu pemikiran yang logis serta didukung pola pikir yang ilmiah;
- (2) Kesenjangan kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan memengaruhi orang lain, menggerakkan atau memotivasi orang lain;
- (3) Kesenjangan kemampuan mengelola sistem dan organisasi, dalam bentuk kemampuan menerjemahkan pemikiran pribadi menjadi pemikiran pemikiran bersama (Drucker, dalam Riant Nugroho, 2008:109—110).

Kesenjangan semacam ini tampaknya di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem berlaku secara permanen, terbukti sampai penelitian ini dilakukan tidak ada orang-orang kepercayaan (*trustee* atau *circle of power*) yang mampu memengaruhi pengembangan kebijakan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali. Dengan kondisi demikian para pekerja di lapangan cenderung menerima apapun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pekerja. Apalagi mereka merasa memiliki pengetahuan yang sangat jauh di bawah dibandingkan Kepala Dinas. Sebab dalam masyarakat yang berbasis pengetahuan, warga masyarakat akan sangat tunduk pada pemimpinnya yang memiliki pengetahuan lebih banyak dan lebih tinggi dari pada dirinya.

## **5.2 Kebijakan dan Praktik Manajemen**

Dilihat dari akar katanya kata kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budinya; pandai atau mahir (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:131). Selanjutnya, kata bijak ini mendapat awalan ke dan akhiran an lalu menjadi kata kebijakan

yang berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Sementara Anderson (dalam Abdul Wahab, 2008:2) mengatakan bahwa kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, atau instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam satu bidang kegiatan tertentu.

Berangkat dari konsep kebijakan menurut beberapa ahli di atas, maka yang dimaksud kebijakan dalam konteks kajian ini adalah serangkaian asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah di lingkungan Pura Besakih.

Sedangkan manajemen dimaksudkan oleh Terry dan Rue (1991:1) adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Jadi, berangkat dari konsep kebijakan dan manajemen sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat makin rumitnya proses teknologi dan pengaruh lingkungan terhadap pengelolaan sampah, maka sangat diperlukan kebijakan dan praktik manajemen yang baik untuk bisa mendapatkan hasil pengelolaan yang baik pula.

Mengenai kebijakan pengelolaan sampah untuk di kawasan Pura Besakih telah di atur dalam Perda Kabupaten Karangasem No.20/tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Sementara peranan manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan persampahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Terkait dengan manajemen pengelolaan sampah, maka dalam penelitian ini yang ingin dikaji adalah sumber daya pengelolaan sampah, yakni sarana, prasarana, pembiayaan pengelolaan sampah, dan monitoring oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional pelayanan pengangkutan sampah dari ruang-ruang publik tempat di mana persembahyangan bersama di lakukan menuju ke TPA, karena tempatnya tinggi dan cenderung berundak-undak, maka dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem telah menyiapkan sejumlah grobak sampah yang bisa di bawa keliling oleh petugas terutama di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh Truk, lalu dikumpulkan di suatu tempat tertentu baru diangkut pakai Truk ke TPA. Seperti tampak pada gambar di bawah ini :



**Gambar 5.3 : gerobak sampah digunakan untuk mengangkut sampah di ruang-ruang yang tidak terjangkau oleh Truk (Dok:Suda)**

Menurut penuturan Bapak I Gusti Lanang Teges, Mandor kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, untuk Pura Besakih :

“...sarana pengelolaan sampah tidak memadai sama sekali, terutama armada pengangkutan sampah ke TPA. Kami bersama anak buah sering harus memikul sampah dan berjalan kurang lebih 800 meter dari kawasan pura menuju ke TPA. Sebab sampai saat ini kami hanya di kasi satu unit Truk pengangkut sampah dan dua buah ambrol dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali itupun kondisinya sudah tidak baik...” (Wawancara, 8 November 2014).

Hal senada disampaikan pula oleh I Gusti Ngurah Andika (28 tahun) salah seorang staf kebersihan dan pertamanan Kabupaten Karangasem dengan mengatakan sebagai berikut.

“...sarana prasarana pengelolaan sampah di kawasan Pura Besakih ini dapat dibilang masih belum memadai, sebab selain kurangnya kendaraan untuk mengangkut sampah sarana yang lain seperti gerobak roda juga relatif terbatas. Maka kami sering mengalami kesulitan untuk mengangkut sampah dari kawasan pura menuju ke TPA, karena jaraknya lumayan jauh sekitar 800 meter dan itu kami lakukan dengan cara memikul...” (Wawancara, 8 November 2014).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sampai saat ini, sarana prasarana penunjang pengelolaan persampahan di kawasan Pura Besakih, meskipun itu merupakan satu-satunya Pura terbesar di Bali, dapat dikatakan belum memadai. Hal demikian tentu menjadi sesuatu yang sangat ironis, bagi perkembangan Bali ke depan. Sebab di satu sisi Bali mempunyai moto “*clean and green*” di sisi lain sarana prasarana penunjang kebersihannya tidak memadai.

Mengenai mekanisme pengawasan (monitoring) pengelolaan sampah di kawasan Pura Besakih dilakukan oleh dua orang pengawas, yakni Bapak I Gusti Lanang Teges (53 tahun) sebagai Mandor pengawasan yang bertugas mengawasi pekerjaan pengelolaan sampah di bagian sebelah timur kawasan pura dan ditugaskan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem. Sedangkan yang lagi satunya adalah Bapak I Ketut Suri (40 tahun) bertugas melakukan pengawasan di bagian sebelah barat kawasan pura, dan ditugaskan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali.

Meskipun berdasarkan kawasan tugas mereka dibagi menjadi dua bagian, yakni kawasan di sebelah barat pura dan kawasan sebelah timur pura, akan tetapi dalam mekanisme pelaksanaannya selalu terjadi koordinasi yang baik di antara mereka. Mereka dalam bekerja tidak melakukan demarkasi wilayah secara ketat, melainkan melakukan koordinasi kerja dengan lentur dan baik, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar meskipun masih terdapat kekuarangan di sana-sini, yang dikarenakan terbatasnya pralatan yang disediakan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan, baik untuk di Kabupaten Karangasem maupun untuk di Dinas Provinsi.

## **BAB VI**

### **HAMBATAN DALAM MENANGGULANGI SAMPAH PLASTIK PADA UPACARA PIODALAN DI PURA BESAKIH**

#### **6.1 Hambatan Tenaga Kerja**

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa jumlah tenaga kerja yang ditugaskan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, baik untuk Kabupaten Karangasem maupun untuk Dinas Provinsi Bali, guna menanggulangi sampah pada setiap upacara *piodalan* ataupun untuk kegiatan sehari-hari di Pura Besakih adalah sebanyak 62 orang, yang terdiri atas 37 orang staf dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dan sebanyak 25 orang staf dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali. Untuk menanggulangi sampah sehari-hari dalam keadaan normal dalam arti tidak ada *rerahinan* jumlah tenaga sebanyak itu, cukup memadai. Akan tetapi pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari *purnama*, *tilem*, *Kajeng Kliwon*, dan hari-hari suci lainnya, jumlah tenaga sebanyak itu menjadi sangat kurang.

Apalagi pada saat upacara *piodalan* di Pura Besakih berlangsung, di mana para *pemedek* tidak saja datang dari seluruh plosok pulau Bali, tetapi juga dari berbagai daerah lainnya di Indonesia seperti dari Lombok, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain tentu dengan sarana persembahyangan masing-masing. Hal demikian membuat volume sampah yang harus dikelola oleh staf kebersihan di Pura Besakih menjadi sangat tinggi. Bahkan menurut penuturan kedua Mandor kebersihan untuk kawasan Pura Besakih, bahwa jumlah sampah setiap harinya pada upacara *piodalan* di Pura Besakih, tidak kurang dari satu ton. Seperti dikatakan oleh Bapak I Ketut Suri (40 tahun) Mandor Kebersihan untuk kawasan Pura Besakih dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali. Diantara pernyataannya dia berucap:

“...pada saat upacara *piodalan* berlangsung saya bersama staf yang jumlahnya sebanyak 62 orang sering kualahan menangani sampah yang jumlahnya begitu banyak, terutama di daerah-daerah parkir. Sebab belum sempat saya bersihkan udah datang *pemedek* baru lagi sehingga, sering sampah itu numpuk di tempat-tempat parkir. Sedangkan untuk di wilayah areal pura, kami tidak sampai kualahan, sebab ada saja *pemedek* yang *mekemit* (*nginep*) yang secara sukarela mau ikut membantu kami untuk melakukan pembersihan...” (Wawancara, 12 November 2014).

Ucapan senada disampaikan pula oleh I Nyoman Lembut (30 tahun) salah seorang staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

“...Hambatan utama yang kami hadapi dalam hal pengelolaan sampah khususnya di kawasan Pura Besakih adalah jumlah sampah yang terlalu banyak terutama di saat *piodalan* berlangsung. Jumlah sampah bisa sampai satu ton lebih setiap harinya. Untuk mengangkut sampah ke TPA yang jaraknya kurang lebih 800 meter dari kawasan Pura kami agak kualahan, sebab kami hanya disiapkan satu truk pengangkut dan dua buah ambrol itu pun kondisinya sudah tidak bagus. Jadi, jangankan memilah sampah plastik dengan sampah non-plastik yang bisa kami lakukan, bisa membawa sampah-sampah yang jumlahnya banyak itu ke TPA saja sudah sangat syukur....” (Wawancara, 12 November 2014).

Dari pernyataan kedua staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan, baik dari Dinas Kabupaten maupun Dinas Provinsi dapat dibangun sebuah pemahaman baru bahwa, perhatian pemerintah, baik pemerintrah kabupaten maupun pemerintah provinsi terhadap persoalan lingkungan, terutama menyangkut masalah kebersihan lingkungan masih sangat kurang. Hal ini terbukti dari keluhan para staf dalam menjalankan tugasnya yang tidak bisa maksimal karena terbatasnya tenaga kerja dan peralatan yang disediakan oleh pihak pemerintah untuk menanggulangi sampah itu sendiri. Sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada upaya pemerintah untuk mencari investor, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dapat diajak kerjasama untuk menanggulangi sampah menjadi sesuatu yang dapat mendatangkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dari proses pengolahan sampah tersebut.

Sementara di sisi lain bidang pengembangan kapasitas kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Karangasem mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan penyadaran masyarakat dalam bidang teknik pengelolaan kebersihan/persampahan. Terkait dengan tugas tersebut, bidang ini telah menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, yakni memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah itu dilakukan, selain untuk kepentingan kesehatan kita sebagai manusia juga untuk kelestarian lingkungan, agar para generasi muda kita ke depan juga mempunyai kesempatan untuk menikmati alam lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari.

Kegiatan ini dilakukan hampir setiap semester sekali dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan oleh pihak Dinas terkait. Namun, dalam praktiknya banyak juga masyarakat yang membuang

sampah sembarangan, sehingga menjadi kendala tersendiri bagi para staf dalam hal menanggulangi sampah secara professional.

Apa yang dilakukan oleh bidang pengembangan kapasitas kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem di benarkan oleh Komang Astawa (32 tahun) salah seorang staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dengan mengatakan sebagai berikut:

“...Ya memang benar telah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Besakih mengenai pentingnya pengelolaan sampah itu dilakukan, agar tidak merusak lingkungan. Akan tetapi yang datang untuk bersembahyang ke Pura Besakih, kan tidak hanya masyarakat Desa Besakih, akan tetapi masyarakat dari seluruh Bali, bahkan dari luar Bali. Jika mereka datang tanpa berbekal kesadaran sendiri tentang betapa pentingnya kebersihan untuk kesehatan dan lingkungan, maka tidak mungkin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang datang ke Pura Besakih ini...” (wawancara, 15 November 2014).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi petugas kebersihan di kawasan Pura Besakih, terutama dalam hal pengelolaan sampah plastik adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan pihak petugas. Misalnya, kesadaran masyarakat untuk ikut membantu memilah antara sampah plastik dengan sampah non-plastik belum ada, padahal pihak petugas telah menyiapkan tempat khusus untuk sampah plastik dan tempat khusus untuk sampah non-plastik. Akan tetapi dalam kenyataannya, masyarakat jarang peduli dengan pemilahan sampah plastik dengan sampah non-plastik. Hal demikian tentu juga menjadi salah satu hambatan bagi petugas untuk melakukan pemilahan ulang, apalagi jumlah sampah yang begitu banyaknya, sementara tenaga petugas yang tersedia sangat terbatas.

## **6.2 Hambatan dari Segi Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah para *pemedek* yang datang setiap saat untuk melakukan pemujaan ke Pura Besakih dengan segala perlengkapan sarana upacaranya. Peran serta masyarakat (para *pemedek*) dalam menyukseskan tujuan dan sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem sangatlah besar dan memegang peranan penting sebab masyarakat adalah pelaku kebersihan dan sekaligus penerima manfaat dari proses penanggulangan kebersihan itu sendiri. Artinya, keadaan kebersihan lingkungan



suatu daerah tertentu akan sangat tergantung pada peran serta dan kesadaran masyarakat bersangkutan atas pentingnya kebersihan bagi diri dan lingkungannya.

Namun, dalam kenyataannya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, khususnya di kawasan Pura Besakih, baik dalam bentuk membayar retribusi sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan aktif dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah masih sangat kurang. Hal ini terbukti, dari apa yang dikatakan Bapak Kepala Desa, Desa Besakih, yakni Bapak I Wayan Benya (40 tahun) sebagai berikut.

“...Berbicara soal kebersihan lingkungan memang sesuatu yang sangat sulit, sebab kesadaran masyarakat kita akan kebersihan lingkungan belum ada. Jangankan memilah antara sampah yang berasal dari plastik dengan sampah yang berasal dari tumbuhan organik, kadang-kadang membuang sampah pada tempat-tempat yang sudah kami sediakan saja sulitnya setengah mati. Terutama di areal parkir, kalau di kawasan *utama mandala pura*, mungkin ada rasa takut/sungkan masyarakat terhadap *Ida Betara sane melinggih irika*, sehingga masyarakat di areal-areal *utama mandala* masih agak tertib membuang sampah, tetapi ada juga satu dua orang masyarakat yang berani membuang sampah sembarangan, meskipun setiap habis persembahyangan melalui pengeras suara sudah diimbau oleh *pengenter acara* agar para *pemedek* membuang sampah bekas sarana persembahyangan yang digunakan di tempat-tempat yang telah disediakan. Tetapi karena banyaknya pemedek yang datang, dengan segala karakternya masing-masing pada setiap upacara *piodalan*, maka ada saja di antara mereka yang bersikap tidak disiplin dalam hal membuang sampah, sehingga hal tersebut tetap menjadi hambatan bagi para petugas dalam hal menjalankan tugasnya...” (wawancara, 14 November 2014).

Selain kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan, menurut penuturan Bapak I Wayan Benya bahwa, bagi para pedagang yang berjualan di sekitar areal pura juga tidak dikenakan retribusi sampah. Padahal secara tidak langsung para pedagang juga ikut memberikan andil bagi pengadaan sampah, sebab para pembeli saat membeli sesuatu pasti menggunakan pembungkus apakah itu dari plastik atau dari daun pisang, atau bisa juga pembungkus itu terbuat dari kertas, yang setelah selesai memakai pasti akan disampahkan oleh pemakai itu sendiri.

Ketika ditanya mengapa para pedagang tidak dikenakan retribusi sampah, padahal para pedagang ikut berkontribusi terhadap keberadaan sampah terutama pada hari-hari suci agama Hindu, dia (Wayan Benya) menjawab karena pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memungut retribusi, karena soal retribusi sampah memang belum diatur pada keputusan desa. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa soal retribusi sampah bagi para pedagang adalah kewenangan pemerintah Kabupaten Karangasem. Itulah salah satu sebab kenapa kami tidak

memunggut retribusi sampah kepada para pedagang yang berjualan di sekitar areal pura Besakih.

Selanjutnya, menurut Mandor sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali untuk kawasan Pura Besakih Bapak I Ketut Suri (40 tahun) bahwa :

“...Memang kita harus akui bahwa kesadaran masyarakat terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan relatif masih rendah. Tetapi terhadap hal itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan sosialisasi mengenai persampahan yang telah dilaksanakan beberapa kali di Balai wantilan Pura Besakih. Hal ini dilakukan dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan bagi kesehatan, keindahan, dan kelestarian lingkungan ....” (wawancara, 20 November 2014).

Berangkat dari kedua pendapat di atas, dapat dikembangkan sebuah pemahaman baru bahwa, kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah terhadap pentingnya arti kebersihan bagi kesehatan, keindahan, dan kelestarian lingkungan, bisa menjadi salah satu hambatan bagi upaya pemerintah dalam menanggulangi sampah di areal Pura Besakih, terutama dalam hal penanggulangan sampah plastik. Di satu sisi sampah plastik merupakan sampah yang bersifat *undergradeble* (sangat sulit terurai oleh alam), sementara di sisi lain kesadaran masyarakat akan arti penting kebersihan bagi kesehatan diri, lingkungan, dan keindahan masih sangat rendah, sehingga hal demikian tentu menjadi hambatan tersendiri bagi upaya pemerintah dalam hal penanggulangan sampah.

Meskipun ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh para pekerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem dalam hal menanggulangi sampah di kawasan Pura Besakih, namun sampai saat penelitian ini dilakukan, semua hambatan yang ada masih dapat ditanggulangi, sehingga tidak menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat Besakih dan sekitarnya. Kondisi ini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di TPA Suwung Denpasar. TPA Suwung Denpasar yang memiliki luas lahan seluas 32,48 hektar, sering mengalami penumpukan sampah yang sangat tinggi, disebabkan masyarakat yang membuang sampah di TPA Suwung, tidak hanya masyarakat Denpasar, tetapi juga masyarakat di empat kota yang tergabung dalam Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

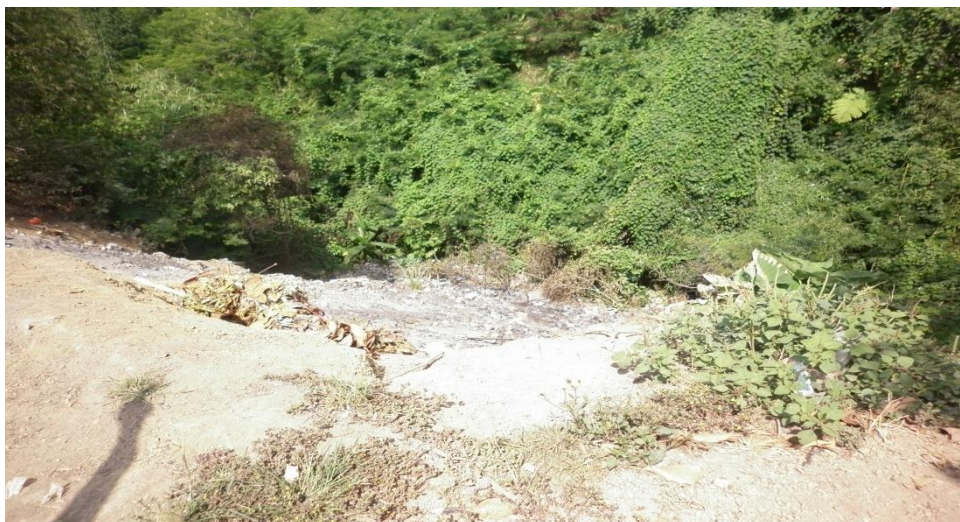
Untuk menanggulangi jangan sampai terjadi penumpukan sampah terlalu tinggi, maka di TPA Suwung Denpasar diterapkan apa yang disebut dengan sistem “*Sanitary Landfel*” yakni suatu sistem untuk mengurangi tingginya tumpukan sampah dengan cara menutup tumpukan sampah dengan tanah secara bertahap, sehingga setelah sampah-sampah organik

mengalami pembusukan, maka permukaan sampah akan menurun (Bali Post, 5 Desember 2014:5).

Sementara untuk di TPA Besakih, menurut Mandor Kebersihan untuk Pura Besakih Bapak I Gusti Lanang Teges sistem *Sanitary Landfel* tidak perlu diterapkan mengingat secara topografi desa Besakih adalah daerah berbukit yang banyak dikelilingi oleh lembah dan ngerai, sehingga tidak akan pernah terjadi penumpukan sampah seperti halnya yang terjadi di daerah-daerah dataran (seperti di TPA Suwung, Denpasar). Berdasarkan hasil observasi di TPA Besakih, persis di sebelah baratnya TPA ada lembah yang sangat dalam, sehingga ketika sampah telah menumpuk banyak oleh para petugas kebersihan dibuang ke lembah tersebut atau apa yang menurut istilah setempat disebut *pangkung*. Seperti tampak pada beberapa gambar di bawah ini.



**Gambar 6.1 : Lembah di sebelah Barat TPA Besakih, yang sering juga dijadikan tempat penampungan sampah-sampah bekas upacara (Dok.Suda)**



**Gambar 6.2 : bekas buangan sampah yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang ada dibawahnya mati karena tertimbun sampah. (Dok.Suda)**

Di dalam lembah sebagaimana tampak pada gambar 7.1 dan 7.2 di atas, tidak ada air mengalir, sehingga pembuangan sampah ke lembah tersebut tidak perlu dikawatirkan akan menimbulkan pencemaran air. Oleh karena lembah tersebut agak dalam dan jauh dari pemukiman penduduk, maka sampai saat penelitian ini dilakukan keberadaan TPA Besakih belum berdampak terlalu signifikan terhadap sanitasi lingkungan sekitarnya. Betapapun keberadaan TPA Besakih jauh dari pemukiman penduduk dan memiliki lembah yang dalam, namun pembuangan sampah sembarangan tetap berpengaruh terhadap lingkungan fisik alam ini, khususnya terhadap tanah. Apalagi pemilahan antara sampah organik dengan sampah *un-organik* tidak dilakukan, mengingat sampah un-organik, khususnya sampah plastik sangat sulit terurai oleh tanah atau bersifat *undegradable*.

### 6.3 Temuan dan Prospek Temuan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa temuan baru dan prospek temuan tersebut terhadap upaya penanggulangan sampah, khususnya sampah plastik, dan mudah-mudahan temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam upaya pelestarian lingkungan, sehingga lingkungan alam ini terhindar dari berbagai bentuk sampah yang bersifat *undergradable* (yang sulit terurai oleh alam). Adapun beberapa temuan penting yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

*Pertama*, masyarakat Bali, termasuk masyarakat Desa Besakih dengan mudah dapat mengadopsi berbagai peralatan yang terbuat dari plastik, karena selain barang-barang yang terbuat dari plastik memiliki nilai pragmatisme yang tinggi juga karena penampilannya lebih modern dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari benda non-plastik.

*Kedua*, secara struktur organisasi dan pembagian tugas serta manajemen kerja pada setiap unit kerja yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem memang telah tertata dengan baik. Akan tetapi persoalan yang kemudian muncul, terkait dengan pengelolaan sampah khususnya di kawasan Pura Besakih adalah pada setiap pelaksanaan upacara *piodalan*, di mana volume sampah sering tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

*Ketiga*, karakteristik pekerja dalam pengelolaan sampah di kawasan pura Besakih dilihat dari aspek pendidikannya, rata-rata tamatan SMP ke bawah. Hal ini berakibat para pekerja kurang inovatif dalam hal mencari dan menemukan berbagai terobosan untuk memberdayakan sampah agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

*Keempat*, pola penanggulangan sampah, khususnya mengenai sampah bekas sarana dan prasarana upacara di kawasan pura Besakih masih dilakukan dengan cara manual, dalam arti belum dikelola secara mekanik, sehingga pengelolaan sampah di kawasan Pura Besakih belum mampu memberikan nilai ekonomi bagi para pengelolanya.

*Kelima*, hambatan mendasar yang dihadapi oleh para pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem untuk kawasan Pura Besakih, adalah minimnya jumlah tenaga kerja yang tersedia, dan peralatan pendukung yang dapat digunakan untuk melancarkan tugas-tugas para pekerja dalam hal penanggulangan sampah, terutama pada saat ada upacara besar di Pura Besakih.

*Keenam*, kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, terutama para *pemedek* juga menjadi salah satu hambatan bagi para pekerja dalam menjalankan tugasnya sesuai tuntutan visi organisasi.

## VII P E N U T U P

### 7.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan antara lain:

- 1) Pada hakikatnya masyarakat Bali telah terkena pengaruh modernisasi dan globalisasi, hal ini nampak dengan jelas dari orientasi masyarakat Bali yang selalu menjadikan kebudayaan Barat sebagai kiblat. Dalam arti orang Bali memandang dunia Barat sebagai dunia yang modern, maju, rasional, dan berkembang dengan baik, sehingga harus diposisikan sebagai pusat, baik sebagai pusat orientasi maupun sebagai pusat teladan. Sementara dunia Timur selalu dipandang sebagai dunia yang tradisional, terbelakang, tidak berkembang, dan tidak baik. Dengan kondisi demikian, maka apa pun yang dilakukan dunia Barat harus diikuti, karena aspek modernitas, rasionalitas, dan kebaikan selalu dianggap mengalir dari dunia Barat ke dunia Timur agar masyarakat Timur dapat sejajar dengan masyarakat Barat. Dengan demikian masyarakat Bali termasuk masyarakat Desa Besakih dengan mudah dapat mengadopsi berbagai peralatan yang terbuat dari plastik karena aspek modernitas dan nilai praktis yang dimiliki oleh peralatan dari plastik itu sendiri.
  
- 2) Pola penanggulangan sampah yang dilakukan para pekerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Karangasem, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Bali untuk Kawasan Besakih masih sangat manual. Dalam arti hanya mengumpulkan sampah di satu tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa ada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Jadi dapat dikatakan pola penanggulangan sampah di TPA Besakih belum dilakukan secara mekanik, dalam arti belum menggunakan peralatan teknologi yang memadai. Kalau toh sudah disiapkan mesin pengolahan sampah menjadi pupuk kompos kapasitas mesinnya sangat kecil dan tidak didukung oleh prasarana lainnya, seperti PAM sehingga mesin tidak dapat bekerja maksimal.

- 3) Secara garis besar proses pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik di kawasan Pura Besakih para pekerjanya mengalami dua hambatan besar, yakni, terbatasnya tenaga kerja yang ditugaskan oleh pemerintah dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk menanggulangi sampah di kawasan Pura Besakih. Hambatan kedua adalah kurangnya kesadaran dan peranserta masyarakat, terutama para *pemedek* untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan, terutama pada upacara piodalan di Pura Besakih. Hal ini berakibat menumpuknya sampah terutama di areal-areal parkir sebab belum sempat petugas membersihkan sampah yang dibuang oleh para *pemedek* yang satu sudah datang lagi pemedek baru parkir ditempat yang sama, sehingga sampah terus saja menumpuk di tempat tersebut, dan hal ini sering mengganggu pemandangan dan juga dapat menyebabkan munculnya bau tak sedap di sekitar areal tersebut.

## 7.2 Saran

Berpijak pada beberapa temuan yang didapat, ada beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

- 1) Kepada seluruh masyarakat Bali umumnya, dan masyarakat Desa Besakih khususnya, disarankan agar lebih selektif dalam memilih barang-barang yang terbuat dari plastik. Sebab banyak peralatan yang terbuat dari plastik mudah rusak dan sulit diperbaiki, sehingga gampang disampahkan. Di sisi lain sampah plastik bersifat *undegradable* (sangat sulit terurai) oleh alam dan jika dibakar juga dapat mengganggu kesehatan terutama pada kalangan perempuan dan para ibu hamil.
- 2) Kepada seluruh masyarakat Bali, terutama para *pemedek* yang melakukan persembahyangan di Pura Besakih disarankan agar mentaati himbauan petugas kebersihan agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Demikian juga dalam hal membuang sampah agar membuang sesuai tipikal sampahnya, misalnya sampah organik hendaknya dibuang di tempat sampah organik yang telah disediakan dan sampah anorganik agar dibuang di tempat sampah anorganik yang juga telah diisi label oleh para petugas.

- 3) Kepada pemerintah Kabupaten Karangasem dan juga pemerintah Provinsi Bali, terutama Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar memperhatikan berbagai kendala yang dihadapi para petugas kebersihan di lapangan, sehingga tujuan organisasi terutama visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dioptimalkan.
  
- 4) Kepada pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, baik di tingkat Kabupaten Karangasem maupun tingkat Provinsi Bali agar memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang petugas kebersihan di lapangan, seperti alat angkutan, tempat-tempat penampungan sampah sementara agar lebih diperbanyak, dan agar melengkapi sarana transportasi berupa truk kecil yang bisa di bawa keliling desa Besakih untuk mengangkut sampah ke TPA, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di tempat-tempat tertentu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Nengah Bawa, 2005. Bali pada Era Globalisasi Pulau Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya. Draf Buku.
- Atmadja, Nengah Bawa, 2010. *Ajeng Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Atmadja, Nengah Bawa dan Anantawikrama Tungga Atmadja, t.t . Sekolah + (Bertaraf Internasional, Unggulan, Favorit) = Biaya Mahal= Komersialisasi Pendidikan. (Makalah diseminarkan).
- Bali Post*, 11—17 November 2013.
- Bali Post*, 5 Desember 2014.
- Bali Post*, 26 Oktober 2014
- Barthers, R, 2004. *Mitologi* (Nurhadi Penerjemah). Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Budiana, I Nyoman 1995. Aspek Sosiologi Sistem Kewarisan Hindu, Suatu Studi tentang Prilaku Pembagian Harta Kekayaan dalam Sistem Kewarisan Hindu di Bali. Hasil Penelitian Disampaikan pada Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar.
- Bogdan, R. dan S.J. Taylor, 1993. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (a. Kozin Afandi, Penerjemah) Surabaya: Usaha Nasional.
- Chang, W. 2000. *Moral Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Danandjaja James, 1991. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng dan lain-lain*. Jakarta: PT Graffiti.
- Fakih, M., 2004. *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: INSIST Press Printing.
- Fox Stuart, 2010. Pura Besakih, Pura, Agama, dan Masyarakat Bali. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Geertz, C. 1999. *After Fact Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropolog*. (Landung Simatupang, Penerjemah) Yogyakarta: LKiS.
- Gunadha, I.B., dan I. B. Dharmika. t.t. Kerangka Konseptual Hindu Mengenai Hubungan Timbal Balik Antara Manusia dan Lingkungan. Makalah diseminarkan dalam Seminar Nasional ‘‘Nilai-Nilai Agama dan Kebudayaan dalam Pelstarian Lingkungan Hisup’’.Kerjasama DPD RI dengan LP2M Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Harian Bali Post*, Minggu Pon, 26 Oktober 2014.
- Hert, , N., 2004. *Kapitalisme Global dan Kematian Demokrasi Membunuh atas Nama Kebebasan The Silent Take Over*. (Dindin Salahudin Penerjemah). Bandung: Nuasa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995. Edisi Ke Dua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat 1980. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Kraft, A.S. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Lengkana, Lili, 2009. *Kreasi Unik dari Plastik, dari Sampah Menjadi Rupiah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lincoln, Y.S. dan E.G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Moleong, J. Lexy, 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monografi Desa Besakih, 2013.
- Nugroho, Heru, 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho Riant, 2008, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000—2006*. Yogyakarta: Pustka Pelajar.
- Pilliang, Y.S., 2003. *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Riant Nugroho, 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000—2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George, 2002. *Ketika Kapitalisme Berjingkrang, Telaah Kritis, terhadap Gelombang McDonaldisasi*. (Solichin Didik P.Yuwono, penerjemah), Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G, dan D.J. Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Modern*. (Alimandan Penerjemah). Jakarta: Prenada Media.
- Simandjuntak, 1985. *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Suarna, I. W. dan I Wayan Sandi Adnyana, t.t. Permasalahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Makalah diseminarkan dalam Seminar Nasional ‘‘Nilai-Nilai Agama dan Kebudayaan dalam Pelstarian Lingkungan Hisup’’.Kerjasama DPD RI dengan LP2M Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Suda, I Ketut, 2001. ‘‘Perwujudan Sistem Nilai Melalui Simbol dalam Kehidupan Umat Hindu di Bali’’.Dalam Majalah *Yudistira* Vol II 2001.
- Sudaratmaja, I.G A.K dan Didyazid Soetama, 2003. Pura Subak sebagai Pemelihara Integritas Kelompok dan Ekosistem Lahan Sawah. Dalam Faisal Kasryno, Effendi Pasandaran, dan Achmad M. Fagi (penyunting), *Subak dan Kerta Masa Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Padi Indonesia. Halaman 25—44.
- Stuart-Fox, David,2010. *Pura Besakih, Pura, Agama, dan Masyarakat Bali*. (Ida Bagus Putra Yadnya, Penerjemah) Denpasar:Pustka Larasan.
- Sztomka, P.2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Sang Ayu Putu Reny, Penerjemah). Jakarta: Prenada.
- Terry, G.R dan Rue, L.W 1991. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Niel R., 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. (Ny Zahara Deliar Noer, trj). Jakarta Pustaka Jaya.
- Yuda Triguna, I.B Gd, 2011. *Mengapa Bali Unik?* Jakarta: Pustka Jurnal Keluarga.

**BIODATA PENELITI**  
*(Curriculum Vitae)*

**A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.
  2. Tempat/Tanggal Lahir : Br. Pakudui, Tegallalang, Tahun 1962
  3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  4. Agama : Hindu
  5. Status : Kawin
  6. Pekerjaan : Dosen dpk pada Program Pascasarjana,  
Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
  7. Pangkat, Golongan : Pembina Utama Madya/ Gol. IV/d
  8. Jabatan : Guru Besar
  9. Alamat : a. Rumah : Jln. Antasura, Gang Batu Sari I/1  
Banjar Bantas, Desa Peguyangan Kangin,  
Kecamatan Denpasar Utara Tlp. (0361) 415938  
b. Kantor : Jln. Sanggalangit, Banjar Tembau,  
Penatih, Denpasar Timur Tlp. (0361) 464700
- c. Alamat E-mail : [suda.unhidps@yahoo.co.id](mailto:suda.unhidps@yahoo.co.id)

**B. KELUARGA**

1. Nama Istri : Ir. Ni Nengah Srianti
2. Nama Anak : 1. Dr. I Putu Edy Suardiyana Putra,  
S.Com.,M.Com, Ph.D.  
2. I Made Gede Dwipayana Putra, S.Ked.
3. Menantu : Ni Made Yustisa Putri Wiatna, S.E., M.M
4. Cucu : Putu Pradnya Kavindra  
: Made Mia Ananza

**C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 1 Kedisan, Tegallalang, lulus Tahun 1974
2. SMP Negeri 1 Tegallalang, lulus Tahun 1977
3. TGA Saraswati Denpasar, lulus Tahun 1981
4. Sarjana (S-1) Program Studi/Jurusan PPKn FKIP Universitas Udayana, Singaraja lulus tahun 1986
5. Magister (S-2) Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana, Denpasar lulus tahun 1999
6. Program Doktor (S-3) Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana, Denpasar, lulus tahun 2009.

**D. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Dosen dpk pd prodi PPKn FP-IPS IKIP Saraswati Tabanan Tahun 1987—2008.
2. Dosen dpk pada Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Ilmu Agama, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar 2008—sekarang.
3. Pembantu Dekan III FP-IPS merangkap Ketua Jurusan PMP/ Kn pada IKIP Saraswati Tabanan Tahun 1988— 1990.

4. Pembantu Dekan I FP-IPS merangkap Ketua Jurusan PMP-Kn pada IKIP Saraswati Tabanan Tahun 1990-1994.
5. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Agama, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, 2008—2013.
6. Wakil Rektor I Universitas Hindu Indonesia 2014—2018.
7. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia 2018—sekarang.
8. Wakil Senat Universitas Hindu Indonesia 2018—sekarang.
9. Anggota Steering Committee P4K Bali 2002/2003.
10. Sekretaris Steering Committee P4K Bali tahun 2003/2004.
11. Anggota Tim Monitoring dan evaluasi Manajemen P4K Kabupaten Gianyar Th 2003.
12. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi P4K Kabupaten Gianyar Tahun 2004.
13. Penulis artikel pada beberapa Koran, majalah dan jurnal 1999—sekarang
14. Penyunting Penyelia (Editor Pengawas) Suluh Pendidikan Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IKIP Saraswati Tabanan 2004—sekarang.
15. Pemimpin Redaksi Majalah Widya Teknik, Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia Denpasar, 2008—sekarang.
16. Ketua Tim Peneliti Kontribusi Ekologi dan Sosial Keanekaragaman Hayati Halaman sekolah terhadap Ekosistem 2007.
17. Anggota Tim Fasilitator Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan, 2001/2002.
18. Anggota Tim Pemantau Independen Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 Tingkat Sekolah (TPI-E) se Kabupaten Tabanan.
19. Anggota Tim Pemantau Independen Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008 Tingkat Sekolah (TPI-E) se Kabupaten Jembrana.
20. Peneliti bidang pemberdayaan tenaga kerja anak-anak di sektor industri kecil dan industri rumah tangga.
21. Panitia *In Training of Trainers Candidate on Eco-Cultural- Spiritual Tourism Based on Subak* 2005.
22. Anggota Tim Peneliti Fungsi Ganda Subak dalam Pembangunan Pariwisata Bali tahun 2004.
23. Anggota Litbang Organisasi *Pratisentana Bendesa Manik Mas* (PBMM) Provinsi Bali periode 2000—2004.
24. Pelaku interaktif mengenai masalah-masalah sosial budaya di RRI 2002--2003 dan di Radio Global Kini Jani 4 November 2006.

#### **D. PUBLIKASI BUKU**

1. Profil Bank Sinar dengan Dharma Mewujudkan Kesejahteraan Bersama 2006.
2. *Drs. I Ketut Sambereg, M.M Biografi Seorang Anak Petani Menjadi Pendidik*. Penerbit Percetakan Plawasari : Denpasar, 2006
3. Paradigma Baru dan Strategi UNDIKNAS Denpasar Hadapi Persaingan Global (draft buku), 2006
4. Sebagai Penulis dalam Buku *Isu-Isu Kontemporer Cultural Studies*, Penerbit CV Bintang WarliArtika : Bandung, Tahun 2008
5. *Anak dalam Pergulatan Industri Kecil dan Rumah Tangga di Bali*, Aksara Indonesia : Yogyakarta, 2008.
6. *Merkantilisme Pengetahuan dalam Bidang Pendidikan*. Surabaya: Paramita, 2009.
7. Editor Buku *Konsep Pelestarian lingkungan Menurut Pandangan Hindu (2010)*. Surabaya: Paramita.

8. Sebagai penulis dalam buku Pergulatan Pemikiran Cendekiawan Hindu Perspektif Kritis (Sebuah Bunga Rampai) Penerbit Widya Dharma [UNHI] Press (2013).
9. Sebagai editor buku Pergulatan Pemikiran Cendekiawan Hindu Perspektif Fungsionalisme Struktural (Sebuah Bunga Rampai) Penerbit Widya Dharma [UNHI] Press (2013).
10. Kastanisasi Pendidikan, Ketika Pelajaran Agama Terpinggirkan (2017) (Penerbit: Program Pascasarjana UNHI Denpasar).
11. Membentuk Karakter Anak Melalui Aktivitas Melukis: Studi Analisis pada “I Wayan Gama Painting School” di Desa Adat Keliki Tegallalang, Gianyar, 2018.
12. Sebagai Penulis dalam Buku “Bali dalam Narasi” diterbitkan oleh Pascasarjana, Universitas Hindu Indonesia (2018).
13. Ikut sebagai penulis Buku “Jasa Lingkungan Subak di Bali” Kerja sama Yayasan Somya Pertiwi Bali dengan Fauna & Flora Internasional United Kingdom dan UNHI Press.
14. Ikut sebagai Penulis dalam Buku “Simponi Moderasi Hindu” di Garis Katulistiwa (2018).

#### **F. PUBLIKASI ARTIKEL DALAM BEBERAP MEDIA CETAK**

1. Marginalisasi Pembangunan Sektor Pertanian Harian BisnisBali 10 Januari 2005
2. Perlu Strategi Pemasaran Hasil Usaha KPK, Harian BisnisBali 26 Januari 2005
3. Ada Apa dengan Siswa Memalak, Harian Bali Post, 12 Februari 2005
4. Anak-anak Terhimpit di Balik Lipatan Dolar, Harian BisnisBali, 3 Maret 2005
5. Untuk Apa Gelar Bodong? Harian Bali Post, 10 September 2005
6. Ketegangan Pendidikan dalam Meluasnya Agama Pasar, Harian bali Post, 12 Agustus 2006
7. Ketika Ideologi Pasar Rambah dunia Pendidikan, Harian BisnisBali 14 Agustus 2006
8. Berbisnis dengan Siprit Yadnya dan Berbasis Kearifan lokal, Harian BisnisBali, 16 April 2007
9. Orang Miskin Dilarang Sekolah? Harian Bali Post, 6 Juni 2007
10. Ajegkan Bali Melalui Pendidikan, Tabloid Saraswati, Mei 2006
11. Benarkan Anak-anak Kita Dijadikan Target Perluasan Pasar oleh kaum Industriawan? Harian BisnisBali, 25 Juni 2007
12. Penyebab Kekerasan Seksual pada Anak, Mingguan Tokoh, 29 Oktober—4 November 2006
13. Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran PPKn (Studi Eksperimen di SD No.5 Abian Tuwung, Suluh Pendidikan Jrnal Ilmu-Ilmu Pendidikan Vol. 1 Nomor 1 Juni 2004
14. Implikasi Keterlibatan Anak-anak dalam Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga terhadap dirinya, Keluarga, Sekolah dan Masyarakat: Kasus di Desa Kedisan, tegallalang, Gianyar, Suluh Pendidikan, Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan, Vol.1 Nomor 2 Desember 2004 ISSN : 1829-894X
15. Konflik Antaretnis dan Peran Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia (Suatu Kajian Pustaka, Suluh Pendidikan, Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan, Vol.3 Nomor 2 Desember 2006
16. Faktor Penyebab Munculnya Fenomena Pelacuran Anak-anak (Suatu Kajian Sosiologis), Media Komunikasi, FPIPS, Vol.3 Nomor 2 Agustus 2004, ISSN 1412-8683
17. Interaksi Belajar-Mengajar sebagai Ilmu, Teknologi, dan Seni, Ekspresi, Jurnal Penelitian dan Penciptaan Seni, Vol.6 Nomor 2 Oktober 2006, ISSN 1411-4305
18. Penerapan Teknologi Canggih, Komersialisasi Pendidikan, dan Kanibalisme Intelektual

- dalam Proses Pembelajaran di Sekolah (Suatu Kajian Pustaka) Widia Teknik Vol 1 Nomor 1 Oktober 2008 ISSN 1979-973X
19. Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual dalam Harian BisnisBali, Rebo 25 Maret 2009.
  20. Dana Pendidikan Dikorup Kematian Hati Nurani Tiba (Harian Bali Post, 6 September 2014).
  21. Mencegah Pergeseran Karakter Orang Bali (Harian Bali Post, 15 September 2014).
  22. Pendidikan Agama di Sekolah Tidak Penting? (Harian Bali Post, 23 Januari 2016).
  23. Pendidikan Agama dan Wawasan Mekanistik Vs Rasionalisme (Harian Bali Post, 29 Maret 2016).
  24. Feminimisme Vs Kekerasan terhadap Perempuan (Harian Bali Post, 17 Mei 2016).
  25. Ketika Kesadaran Moral Kaum Remaja Disandera (Harian Bali Post, 27 Juni 2016).
  26. Ironi Pendidikan di Indonesia (Harian Bali Post, 2 Juni 2016).
  27. Budaya Baca Mati, Kreativitas berpikir Mandek (Harian Bali Post, 11 Juni 2016)
  28. Menyoal rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Indonesia (Harian Bali Post, 11 Oktober 2016.)
  29. Ekspektasi Orang Tua terhadap Pendidikan Generasi Muda Bali (Harian Bali Post, 10 Januari 2017).
  30. Matinya Multikulturalisme di Indonesia (Harian Bali Post, 12 Juni 2017)
  31. Bagaimanakah Generasi Muda Seharusnya Memaknai Kemerdekaan? (Harian Bali Post, 8 Agustus 2017).

## **G. PENELITIAN DAN KEGIATAN AKADEMIK**

1. Laporan akhir Steering Committee P4K Bali terhadap Kinerja Manajemen Proyek P4K Bali. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) Steering Committee P4K Bali 2004.
2. Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi P4K Kabupaten Gianyar. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Tahun Anggaran 2004/2005
3. Kontribusi Ekologi dan Sosial dari Keanekaragaman Hayati Halaman Sekolah terhadap Ekosistem Urban. Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 211/SP2H/PP/DP2M/III/2007. Tanggal 29 Maret 2007. Insitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saraswati Tabanan.
4. Membangun Bisnis dengan Spirit Yadnya dan Berbasis Kearifan Lokal. Disampaikan dalam acara temu Bisnis Tingkat Nasional Kerjasama antara Koran BisnisBali dengan Bank Sinar Harapan Bali, 7 April 2007.
5. Mengikuti Diskusi Terbatas bertajuk “Perdagangan Ilmu Pengetahuan”. Kerjasama BisnisBali Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar, 2008.
6. Seminar “Modern Academic Management Series” Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Efektif sesuai dengan kebutuhan manajemen Perguruan Tinggi. Universitas hindu Indonesia, 16 Agustus 2008.
7. Peserta seminar “Sosialisasi ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen luar Negeri bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Udayana Bali, 2008.
8. Peserta seminar nasional Kajian Budaya “Sisi Lain Pemilu” dilaksanakan di Denpasar 28 Oktober 2008.
9. Panitia seminar regional tentang Strategi Pemilihan Material Metode Rekayasa Konstruksi Kajian Struktur, Arsitektur dan Manajemen. Dilaksanakan oleh Fakultas

- Teknik Universitas Hindu Indonesia 7 Juli 2008.
10. Panitia Seminar Nasional “Jalan Layang di Bali Ditinjau dari Aspek Teknologi, Agama, Dan Budaya” di Gedung Widya Sabha UNHI, 18 Desember 2008.
  11. Peserta seminar Nasional tentang Upacara Yadnya di Bali dilihat dari Dimensi Spiritual, Ekonomi, dan Sosial Budaya dilaksanakan di Universitas Hindu Indonesia Denpasar, tanggal 30 April 2008.
  12. Peserta Kongres Kebudayaan Bali I 14—16 Juni 2008
  13. Peserta Seminar Internasional of “Religion Conversion” Conducted by the University of Hindu Indonesia Denpasar in cooperation with the Institut of Religious Peace and Reseach Goethe University Frankfurt Germany, in Denpasar on 1rst, June 2008.
  14. Peserta pada acara International Summit “Community management of Bioscurity” hosted by the Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Indonesia, at Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar, May 24<sup>th</sup>—26<sup>th</sup> 2007.
  15. Peserta dalam Seminar Ilmiah dosen pada IKIP Saraswati Tabanan di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII, 25 Agustus 2007.
  16. Peserta dalam seminar Pemulihan Citra Bali yang diselenggarakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, di Denpasar 12—13 Agustus 2006.
  17. Moderator dalam Ceramah Sertifikasi Guru Berkaitan dengan Grand opening Kolam renang Mahajaya, di Hotel Mahajaya Tower Denpasar, 24 Februari 2008.
  18. Peserta dalam Work Shop “Kiat-Kiat Memenangkan Penelitian Hibah Bersaing” Diselenggarakan oleh Lemlit UNHI Bekerjasama dengan DP2M Dikti, 28—29 Nopember 2008.
  19. Moderator dalam Work Shop Pemaknaan Banten secara Filosofis, Teknik Pembuatannya, dan etika Berbusana Ke Pura. Kerjasama Mahajaya Agrowisata, UNHI, Rane Cosmetic dan Bisnis Bali (Kelompok Media Bali Post) 15 Februari 2009.
  20. Moderator dalam Workshop Pemaknaan Banten secara Filosofis, Konsep Bangunan Bali dan Upakaranya, Etika Berbusana ke Pura, dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, kerja sama BinisBali (Kelompok Media Bali Post) dengan Dekan Fakultas Teknik UNHI Denpasar, dan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, 8 Maret 2009.
  21. Moderator dalam Workshop Pemaknaan Banten secara Filosofis, Teknik Pembuatannya, dan Membangun Bali dengan Spirit Yadnya Kerjasama BisnisBali dengan UNHI Denpasar, 15 Maret 2009
  22. Nilai-Nilai Pendidikan Hindu pada Ceritera Rakyat dan Implementasinya pada Masyarakat India, 2013. Penelitian Post Doktoral and Sandwich Program for Research on Hindu Tradition and History India.
  23. Melakukan penelitian dengan judul “ Pola Penanggulangan Sampah Plastik pada Upacara Piodalan di Pura Besakih (Perspektif Sosio-Ekologis). Hibah Penelitian Kompetitif Dosen S-2 dan S-3 (Dipilih) Ditjen Bmas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia 2014.
  24. Marginalisasi Pendidikan Agama pada Sekolah Favorit di Kota Denpasar: Studi Kasus pada SMA 1 Saraswati. Hibah Penelitian Kompetitif Dosen S-2 dan S-3 (Dipilih) Ditjen Bmas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia 2015.
  25. Membangun Karakter Anak-Anak Melalui Kreativitas Seni: Studi Kasus pada “I Wayan Gama Painting School” di Desa Adat Keliki, Tegalalang, Gianyar. Hibah Penelitian Kompetitif Dosen S-2 dan S-3 (Dipilih) Ditjen Bmas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016.

